

BOS SRITEX DIDUGA GARONG UANG NEGARA RP 3,58 TRILIUN

Pejabat Top Bank Jabar Banten dan Dirut Bank DKI Diseret Jadi Tersangka

JAKARTA, BN - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBB) dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya, pada Senin (2/6/2025).

Bersambung ke hal.11 kol.1



Tersangka Iwan Setiawan Lukminto.

Kasus Dugaan Mal Praktek RS Siti Hajar 'Mangkrak' di Polresta Sidoarjo



Keluarga korban dugaan Malpraktek RS Siti Hajar, saat jumpa media. (Foto: ist)



Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Prof. M. Sholehuddin.

Bersambung ke hal.11 kol.1

Tim Satpol PP Magetan Sidak Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Panekan, Sukomoro dan Kawedanan



Kegiatan tim Satpol PP Magetan Sidak Gempur Rokok Ilegal selama 2 hari yaitu Rabu dan Kamis (21-22/5) di Kecamatan Panekan, Sukomoro dan Kawedanan kabupaten Magetan. (Ashar)

MAGETAN, BN - Perjalanan Giat Sidak Gempur Rokok Ilegal selama 2 hari yaitu Rabu dan Kamis (21-22/5) khususnya hari kedua di Kecamatan Panekan, Sukomoro dan Kawedanan. Wartawan Bidik Nasional (BN) Biro Magetan Ashar AR, mengikuti Tim Sukomoro di empat desa yaitu ; Kembangan, Kedung Guwo, Bogem dan Kentangan. Tim menyusuri toko-toko dan warung-warung penjual rokok di empat desa tersebut.

Meskipun dari toko ke toko dan dari warung ke warung yang ada penjualan rokok didatangi, tidak ditemukan penjualan rokok ilegal yang TIDAK ADA PITACUKAI nya, ROKOK POLOS, ROKOK PITA CUKAI yang dilekatkan BUKAN PADA PORSI nya dan atau pun ROKOK DENGAN PITA CUKAI BEKAS yang dilekatkan kembali ke kemasan bungkus rokok baru. Meski tidak menemukan rokok illegal, tim tetap semangat memberikan penyuluhan pengertian dan penjelasan kepada pemilik toko dan warung yang ditemui.

Imron dari koordinator tim Satpol PP menyampaikan, resiko yang ditanggung kepada pemilik toko atau pun warung yang menerima tawaran para sales untuk menjual ROKOK ILEGAL, maka akan ditindak sesuai peraturan yang ada. Ini tentunya perjual akan rugi waktu, tenaga dan pikiran dan tentunya harus bayar denda dan hukuman jika terbukti melanggar.

"Jika kedapatan menjual rokok ilegal akan berhadapan dengan sanksi berdasarkan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku berupa sanksi perdata berupa denda beberapa kali lipat dari harga cukai hingga bisa pidana kurungan," kata Imron.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP dan Damkar Magetan, Gunendar, mengutarakan tentang pelaksanaan operasi berpatokan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 terkait Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Lanjut Gunendar, dalam aturan baru tersebut, terdapat sekat pembatas yang harus dipatuhi, termasuk dalam hal sosialisasi dan teknis pelaksanaan operasi.

"Bentuk outdoor dalam melaksanakan Sosialisasi tidak diperkenankan lagi, akan tetapi dapat dikerjakan secara indoor. Proses yang harus dilakukan setiap akan di mulai pelaksanaan operasi Gempur Rokok Ilegal terlebih dahulu adakan pengumpulan Informasi maksimal empat kali," ungkap Gunendar.

Selain itu, Gunendar pun mengutarakan terkait pelaksanaan operasi bersama ini harus dilaksanakan oleh tim yang legal, sesuai dengan Keputusan Bupati yang mengatur teknis pelaksanaan dan keanggotaan operasi gabungan.

"Pelaksanaan kegiatan gempur rokok ilegal baru bisa di mulai operasi pada bulan Mei, setelah keputusan bupati turun. Hari Rabu kemarin 21/5 ini dan dilanjutkan Kamis (22/5) giat operasi bersama tetap di Tiga Kecamatan akan tetapi melanjutkan bagi desa & Kelurahan yang belum tersentuh kemarin itu, yaitu Kecamatan Panekan, Sukomoro, dan Kawedanan," ucap Gunendar pula.

Meskipun Hasil tetap nihil dalam penyusuran adanya penjualan rokok ilegal di Kecamatan Sukomoro, Panekan dan Kawedanan seperti halnya kemarin, 3 tim dalam giat operasi bersama dalam gempur peredaran rokok ilegal tetap semangat dengan wajah ceria karena ada dua kemungkinan, pertama kesadaran para pemilik toko dan warung untuk tidak menjual rokok ilegal lagi dan yang kedua keberuntungan pemilik toko atau pun warung tidak ada saat kedapatan menjual rokok ilegal atau dengan kata lain antara resiko dan hasilnya tidak sebanding jika terjaring razia oleh tim. (Adv/Ashar)

ANGGARAN DISPORAPAR JOMBANG PATUT DIUSUT

JOMBANG, BN - Korupsi masih terus terjadi di Indonesia kendati berbagai upaya telah dilakukan. Berbagai modus korupsi di lakukan, baik dari kalangan dunia usaha ataupun pegawai negeri. Ada beberapa modus korupsi yang paling populer dan terus berulang-ulang setiap tahunnya adalah dugaan penyalahgunaan anggaran adalah modus korupsi terbanyak di Indonesia.

Kasus korupsi dengan modus anggaran kegiatan per tahun,

Bersambung ke hal.11 kol.5



Bambang Nurwijanto

Tumblek Blek!! Ribuan Pengunjung dan Wisatawan Ramaikan Tumpeng Sewu Desa Adat Kemiren Banyuwangi



Para pengunjung tampak antusias mengikuti acara Tumpeng Sewu Desa Adat Kemiren Banyuwangi. (dj)

BANYUWANGI, BN - Tumblek blek, Ribuan orang meramaikan Tumpeng Sewu yang digelar di Desa Adat Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (29/5/2025) malam. Bukan hanya warga masyarakat sekitar, Wisatawan juga turut datang menikmati sajian menu khas suku Osing, etnis asli Banyuwangi.

Warga dan pengunjung telah memadati kanan-kiri jalan raya sejak sebelum Magrib. Mereka duduk lesehan di pinggir jalan dengan hidangan lengkap yang siap disantap.

Selepas Magrib, Festival dimulai dengan pertunjukan Barong Kemiren. Diiringi lantunan musik khas dan pembawa obor, dua barong masing-masing berjalan dari ujung lokasi Festival menuju ke Kantor Desa, pusat arena Pagelaran.

Di sela pertunjukan itu, para pembawa obor menyajikan tiap-tiap obor yang berjejer di kanan-kiri jalan.

Usainya pertunjukan menjadi pertanda bagi warga untuk mulai menyantap menu Tumpeng Sewu yang telah tersedia di lesehan masing-masing.

Mastuki, warga Kemiren, mengatakan, seluruh

warga Kemiren menyiapkan makanan besar setiap pelaksanaan Tumpeng Sewu. Salah satu menu yang wajib ada dalam hidangan ada Pecel Pitik.

Pecel Pitik adalah lauk yang berbahan utama ayam kampung panggang yang dibumbui dengan kelapa parut dan beberapa jenis bahan dapur. Menu ini adalah salah satu makanan khas Suku Osing.

"Biasanya satu keluarga tidak hanya menyiapkan satu tumpeng. Bisa tiga, empat, atau lima. Karena saat Tumpeng Sewu, mereka biasanya akan mengundang kerabatnya yang berasal dari luar Kemiren," kata Mastuki.

Ketua Lembaga Adat Osing Kemiren Suhaimi menjelaskan, tradisi Tumpeng Sewu adalah budaya leluhur sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta.

"Dalam Tumpeng Sewu, ada beberapa tradisi yang juga digelar oleh warga, salah satunya Mepe Kasur (jemur kasus) yang dilakukan pada pagi hingga siang hari," ujar Suhaimi.

Pada tengah malam, masyarakat melanjutkan kegiatan dengan Mocoan Lontar Yusup semalam suntuk. Lontar Yusup merupakan naskah kuno yang bercerita tentang kehidupan Nabi Yusuf.

(Adv/Dj/edy)



BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Adha

10 DZULHIJJAH 1446 H / TAHUN 2025



IMAM HIDAYAT, S.SOS., M.M.
KEPALA BIRO KESRA JATIM



Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga setiap tetes darah kurban membawa rahmat dan ampunan dari Allah SWT

Taqabbalallahu Minna Wa Minkum.

Proyek Jalan Rabat Beton BKK Desa Perak, Baru Seumur Jagung Sudah Rusak



Proyek Jalan Rabat Beton BKK Desa Perak tampak sudah retak-retak. (tok)

JOMBANG, BN - Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sering kali memiliki berbagai modus. Mulai dari penyaluran tidak sesuai aturan, pemotongan dana bantuan, pembentukan kelompok fiktif, hingga

penyalahgunaan anggaran melalui proyek-proyek yang tidak jelas. Selain itu ditemukan praktik Mark up atau peningkatan harga yang tidak wajar. Sehingga anggaran proyek menjadi membengkak. Seperti kita

Dugaan ini muncul karena jalan yang baru selesai dikerjakan sudah memperlihatkan kerusakan, seperti retak, aus dan berdebu. Hasil

investigasi awak media Bidik Nasional (BN) di lapangan Selasa (20/5) pekerjaan tersebut baru seumur jagung sudah keropos

Diduga karena cetakan yang tidak rapat hal ini dapat menyebabkan pengelupasan karena pasta semen tidak dapat menempel dengan baik. Pengelupasan selimut beton (honeycomb) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk melekatnya material asing atau abrasi oleh benda padat.

Pengelupasan permukaan beton yang disebabkan oleh pengeringan atau pengerasan yang terlalu cepat,

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Munas VII Apeksi 2025 Resmi Dibuka, Walikota Probolinggo Dorong Kolaborasi Kota Kecil dan Menengah



Munas VII Apeksi di Convention Hall Grand City Surabaya.

SURABAYA, BN - Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2025 resmi dibuka di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (8/5/2025), dengan suasana penuh semangat kolaborasi dan kebersamaan.

Acara bergengsi ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta Ketua Dewan Pengurus Apeksi Eri Cahyadi. Turut hadir sebagai peserta, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama jajaran, membawa semangat kota kecil untuk bersinergi dan bertukar gagasan dengan seluruh kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia.

Dalam sambutannya, Eri Cahyadi, yang juga Walikota Surabaya, menegaskan peran strategis Apeksi sebagai "rumah bersama" seluruh kota di Indonesia. Ia mendorong pemerataan pembangunan antar kota melalui solidaritas dan kesetaraan. "Kita tidak boleh merasa lebih unggul dari kota lain. Jika rumah ini menjadi surga, maka tidak akan ada kesenjangan. Inilah kekuatan kota-kota di Indonesia," tegasnya.

Wagub Emil Dardak menambahkan, sinergi antar daerah adalah kunci utama pembangunan nasional. "Bertanding boleh, tapi akhirnya kita harus bersanding," ujarnya.

UMKM Udeng Mapan Gelar General Meeting dan Audiensi bersama Walikota Probolinggo



PROBOLINGGO, BN - Pelaku UMKM Udeng Mapan (Kademangan Majudan Mapan) Kecamatan Kademangan menggelar General Meeting dan Audiensi dengan Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin di Hall Puri Manggala Bakti Pemkot Pro-

bolinggo. Rabu, (21/05/2025). Berbagaimana produk unggulan khas Kademangan seperti Strudle Tape, Pizza Tape, Aneka Cemilan, Minuman Olahan dipamerkan dalam kegiatan tersebut.

Ketua Udeng Mapan, Nur Hidayati, tak bisa menyembunyikan rasa harunya ketika memperkenalkan profil singkat paguyuban yang ia pimpin di hadapan Walikota dr. Aminuddin

dan para peserta. "Perjuangan kami tak mudah untuk bisa mencapai sampai detil ini. Saat ini, anggota hampir kurang lebih 200 orang dari penyaringan anggota. Jadi anggota baru wajib mengikuti masa training selama tiga bulan sebelum masuk menjadi UMKM tetapi di dalam paguyuban Udeng Mapan," ucap Nur Hidayati.

Wanita akrab dipanggil Hidaini, menyampaikan harapannya agar program-program Pemkot Probolinggo kedepan bisa semakin mendukung UMKM, tidak hanya di Kecamatan Kademangan, tapi juga di seluruh wilayah Kota Probolinggo. "Kami ingin program-pro-

gram Bapak di lima tahun mendatang menjadi program-program yang mendukung UMKM se Kota Probolinggo, tidak hanya Kecamatan Kademangan, tapi seluruh UMKM Kota Probolinggo," harapnya.

Gayung bersambut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin memberikan apresiasi kepada UMKM Udeng Mapan, dan mendukung perkembangan UMKM di Kota Probolinggo, karena Menurutnya UMKM merupakan salah satu pilar yang berkontribusi membangkitkan perekonomian Kota Probolinggo dan sesuai dengan Program Presiden Prabowo. (SON)

Bayar Rp 7 Juta, Gugat Cerai Abdul Mu'i Warga Desa Nguter Tak Kunjung Selesai

LUMAJANG, BN -

Polemik gugat cerai antara Abdul Mu'i Bin Rai sebagai penggugat dan Anik Budiwati Bin Sumo sebagai tergugat, proses gugat cerai tersebut sudah berjalan hampir 1 Tahun 3 Bulan, namun sampai saat ini belum selesai. Bahkan Abdul Mu'i Bin Rai mengaku ditarik biaya Rp 7.000.000,- oleh Kaur Keuangan merangkap Kaur Kesra Desa Nguter.



Maskur Kaur Keuangan Merangkap Kaur Kesra Desa Nguter.



Abdul Mu'i

"Maskur ini merangkap dua jabatan Kaur Kesra dan Kaur Keuangan, padahal Kaur Kesra di Desa Nguter sudah sejak lama dipegang/diurus oleh Sulikan, yang selama ini menangani gugat cerai di desa tersebut. Ada dugaan Maskur menjalankan bisnis menarik biaya yang selama ini tidak wajar dan diduga banyak korban-korban yang lain terkait dengan pengurusan gugat cerai di Desa Nguter dengan merangkap 2 jabatan sekaligus," ujar sumber Bidik Nasional (BN).

Menurut sumber, secara umum perangkat desa dilarang merangkap jabatan, larangan tersebut bertujuan untuk menjaga fokus dan integritas perangkat desa dalam menjalankan tugasnya, sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf B, juga melarang perangkat desa merangkap jabatan, sanksi bagi perangkat desa yang merangkap jabatan dapat berupa pemberhentian sementara/pemberhentian definitif. "Dengan dasar-dasar diatas ini yang perlu dipertegas kepada Maskur Kaur Keuangan Desa Nguter, untuk bertanggung jawab dalam masalah ini," tandas sumber itu.

Dengan dasar pengaduan Abdul Mu'i, diduga sebagai korban Maskur Tim Media BN Selasa (22/04/25) jam 10.37 WIB langsung konfirmasi ke Desa Nguter bertemu dengan Maskur. Maskur mengakui kalau merangkap 2 jabatan Kaur Keuangan dan Kaur Kesra. Ketika ditanya tentang biaya gugat cerai Abdul Mu'i, ia mengaku hanya persenan/komisian saja, karena pengurusannya ia lewatkan pengacara. "Semua keuangan saya serahkan ke pengacara yang mengurusnya," kilahnya.

Kamis (24/04/25) jam 13.20 WIB, tim media BN konfirmasi ke kantor pengacara kondang yang berdomisili di Kabupaten Lumajang yang disebutkan Maskur. Pengacara menjelaskan secara tegas dan profesional, bahwa hanya menerima Rp 4.000.000,- saja, untuk biaya surat kuasa dan pendaftaran gugatan ke Pengadilan Agama, Kalau dibilang saya menerima Rp 7.000.000,- itu tidak benar, berati ini mencemarkan nama baik saya, biar Abdul Mu'i melaporkan masalah ini, kalau bisa anggaran tersebut senilai Rp 3.000.000,- tidak dikembalikan oleh Maskur," ujarnya.

Ketika ditanya belum selesainya proses tersebut, pengacara tersebut mengatakan, karena ini masih banding di Pengadilan Tinggi Surabaya dan ada permintaan dari tergugat, baru diselesaikan oleh penggugat, "saya tetap bertanggungjawab dan menyelesaikannya, meskipun biaya tidak sesuai yang disebutkan," tegasnya. (tim)

Wakil Bupati Bojonegoro Hadiri Jalan Sehat di Kecamatan Temayang

BOJONEGORO, BN -

Dalam Rangka menyehatkan masyarakat dengan berolahraga, Pemerintah Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro menggelar Jalan Sehat dengan tema "Membangun Sehat Tanpa Narkoba" di lapangan Desa Jono, Kecamatan Temayang Bojonegoro, Minggu 25/5/2025.



Wakil Bupati Bojonegoro memberikan sambutan di acara Jalan Sehat didampingi Camat Temayang dan Kades Jono di lapangan Desa Jono, Kecamatan Temayang Bojonegoro, Minggu 25/5/2025 (pri)

masyarakat di wilayah Kecamatan Temayang mulai dari pelajar SD, MI, Ibu-ibu PKK, perangkat desa dan Kepala Desa Kecamatan Temayang.

Jalan sehat diberangkatkan oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Acara dimulai pukul 6.30 wib dengan diawali senam bersama Wakil Bupati didampingi Camat Temayang, Moch Basuki, Kapolda Temayang, AKP Eko Suwanto, Koramil dan Kepala Desa Jono, Hj Henis Meindrawati.

Acara yang digelar di lapangan Desa Jono Kecamatan Temayang ini terpantau sangat meriah. Panitia menyediakan berbagai hadiah para peserta jalan sehat salah satunya hadiah utama 1 sepeda motor Honda Beat.

Sementara, Kepala Desa Jono, Henis Meindrawati ketika ditemui awak media mengaku sangat senang karena masyarakat diajak berolahraga jalan sehat.

"Acara ini di pusatkan di lapangan Desa Jono, tempatnya juga strategis, warga kami juga sangat gembira apalagi acara ini dihadiri ibu Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Beliau ramah semua disalaminya dan masyarakat semangat sekali," paparnya. (pri)

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK
NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Edy Sutarto. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Teddy Syah Roni. PENASEHAT HUKUM : Yustinus Haryanto, SH. REDAKTUR

PELAKUKAN : Budi Santoso. REDAKTOR : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhwan, Agus. TIM LIPUTAN KHUSUS : Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto. JAWA TIMUR : SURABAYA : Dynas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. SIDOARJO : Nur Yahya. GRESIK : Ariadi AM. PAMEKASAN : Ainur Halis. SUMENEP : Adi Yusman, Ishak. SAMPANG : Holillurohman. MOJOKERTO : Husnan. JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. NGANJUK : Agung Moch. Suhada, Sugiantoro, Dodik Andiyanto. KEDIRI : Nyoto Dharmawan. TULUNGAGUNG/TRENGALEK : Nik Atin. MADIUN : Basuki. NGAWI : Leo Lunardi T. MAGETAN : Ashar AR. PONOROGO : Andhy Wijaya. LAMONGAN : Syaiful Anam, Sulistiowati, Arif Mustofa, Joko Santoso. BOJONEGORO : Priyanto. MALANG RAYA : Nino Siriani. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurhman. PAGAR ALAM : Marleo Tarjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhar MY, OKU TIMUR : Nelis Sri Wahyuni. OKI : Nuris Oktari. SUMATERA UTARA, KOTA MEDAN : Muhammad Syafei Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennen Tumanjeng (Kabiro), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames. NIAS UTARA : Hadir Syukur Harefa. NIAS BARAT : Syamsudin (Kabiro). PEKALONGAN RAYA : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. BATANG : Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. KENDAL : Peni Kusumawati, Doni Kurniawati. KUDUS : Budi Setiawan. GROBOGAN : Heru Budianto. SALATIGA : Susilo Haryadi. BOGOR : Budi Setiawan. BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO : Affandi Masloman. KOTAMOBAGU/BMR : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Rify Tama'un. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleiman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA : Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro). KEPERI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN : Handoko KEP NATUNA : Amir Hamzah. RIAU : Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Siriani. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurhman. PAGAR ALAM : Marleo Tarjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhar MY, OKU TIMUR : Nelis Sri Wahyuni. OKI : Nuris Oktari. SUMATERA UTARA, KOTA MEDAN : Muhammad Syafei Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennen Tumanjeng (Kabiro), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames. NIAS UTARA : Hadir Syukur Harefa. NIAS BARAT : Syamsudin (Kabiro). PEKALONGAN RAYA : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. BATANG : Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. KENDAL : Peni Kusumawati, Doni Kurniawati. KUDUS : Budi Setiawan. GROBOGAN : Heru Budianto. SALATIGA : Susilo Haryadi. BOGOR : Budi Setiawan. BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO : Affandi Masloman. KOTAMOBAGU/BMR : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Rify Tama'un. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleiman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA : Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro). KEPERI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN : Handoko KEP NATUNA : Amir Hamzah. RIAU : Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Siriani. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurhman. PAGAR ALAM : Marleo Tarjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhar MY, OKU TIMUR : Nelis Sri Wahyuni. OKI : Nuris Oktari. SUMATERA UTARA, KOTA MEDAN : Muhammad Syafei Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennen Tumanjeng (Kabiro), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames. NIAS UTARA : Hadir Syukur Harefa. NIAS BARAT : Syamsudin (Kabiro). PEKALONGAN RAYA : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. BATANG : Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. KENDAL : Peni Kusumawati, Doni Kurniawati. KUDUS : Budi Setiawan. GROBOGAN : Heru Budianto. SALATIGA : Susilo Haryadi. BOGOR : Budi Setiawan. BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO : Affandi Masloman. KOTAMOBAGU/BMR : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Rify Tama'un. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleiman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA : Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro). KEPERI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN : Handoko KEP NATUNA : Amir Hamzah. RIAU : Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Siriani. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurhman. PAGAR ALAM : Marleo Tarjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhar MY, OKU TIMUR : Nelis Sri Wahyuni. OKI : Nuris Oktari. SUMATERA UTARA, KOTA MEDAN : Muhammad Syafei Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennen Tumanjeng (Kabiro), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames. NIAS UTARA : Hadir Syukur Harefa. NIAS BARAT : Syamsudin (Kabiro). PEKALONGAN RAYA : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. BATANG : Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. KENDAL : Peni Kusumawati, Doni Kurniawati. KUDUS : Budi Setiawan. GROBOGAN : Heru Budianto. SALATIGA : Susilo Haryadi. BOGOR : Budi Setiawan. BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO : Affandi Masloman. KOTAMOBAGU/BMR : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Rify Tama'un. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleiman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA : Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro). KEPERI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN : Handoko KEP NATUNA : Amir Hamzah. RIAU : Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Siriani. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurhman. PAGAR ALAM : Marleo Tarjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhar MY, OKU TIMUR : Nelis Sri Wahyuni. OKI : Nuris Oktari. SUMATERA UTARA, KOTA MEDAN : Muhammad Syafei Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennen Tumanjeng (Kabiro), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames. NIAS UTARA : Hadir Syukur Harefa. NIAS BARAT : Syamsudin (Kabiro). PEKALONGAN RAYA : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. BATANG : Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. KENDAL : Peni Kusumawati, Doni Kurniawati. KUDUS : Budi Setiawan. GROBOGAN : Heru Budianto. SALATIGA : Susilo Haryadi. BOGOR : Budi Setiawan. BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO : Affandi Masloman. KOTAMOBAGU/BMR : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Rify Tama'un. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleiman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA : Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro).

Bantuan DD BKK Desa Cukir Diduga Dikerjakan Pihak Ketiga, Bisa Dipidana



Pekerja diduga kuat bukan warga Desa Cukir

JOMBANG, BN – Proyek swakelola adalah proyek yang pengadaan barang dan jasanya di lakukan sendiri oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah atau organisasi kemasyarakatan/ kelompok masyarakat, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa. Ini berarti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek dilakukan boleh pihak yang sama (swakelola).

Pengertiannya, dalam proyek kontraktual pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga yang berstatus sebagai kontraktor atau penyedia jasa. Sementara itu, dalam proyek swakelola seperti yang ada di Desa Cukir, Kecamatan Diwek seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh internal lembaga/ organisasi desa sendiri. Jadi proyek swakelola dari Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) di Desa Cukir me-

miliki tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh tim swakelola sendiri yang di bentuk oleh desa, bukan mengambil consultant lain di luar desa.

Tujuan pada proyek swakelola adalah untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan, serta meningkatkan sumber daya manusia di lembaga/ organisasi di desa.

Proyek swakelola dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian anggaran. Pelaksanaan proyek swakelola diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 16 tahun 2018.

Seperti di Desa Diwek informasinya proyek bantuan Dana BKK diswakelolakan, tetapi benar atau tidak, menurut informasi yang di terima Bidik Nasional (BN) diserahkan/ dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum atau prosedur yang

benar. Maka bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Karena diduga adanya penyelewengan dana, penyuapan atau pemalsuan dokumen.

Sementara menurut informasi yang diterima BN, bahwa di Desa Cukir Kecamatan Diwek, dapat bantuan Dana BKK dari salah satu anggota dewan dengan anggaran Rp 200.000.000,- dengan volume 373 M diduga telah di pihak ketiga.

Kalau semua di pihak ketiga, sehingga ada dugaan bahwa TPK (tim pelaksana kegiatan) tidak difungsikan.

Selain itu jika proyek swakelola yang diserahkan kepada pihak ketiga dapat melanggar pidana korupsi (Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor), karena dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Untuk membuktikan kebenaran jika proyek tersebut

di pihak ketiga, Rabu (7/5/2025) Tim BN mendatangi lokasi proyek dan bertemu para pekerja. Pekerja tersebut mengatakan kalau proyek diborong oleh pak Eko, dia juga mengatakan kalau bukan warga desa Cukir, pekerja tersebut beralamat di Desa Kepuhka-jang kecamatan Perak.

Saat itu juga BN mencoba menemui kepala desa, namun kepala desa tidak ada di tempat. Kemudian BN mencoba menghubungi via seluler untuk konfirmasi. Saat itu juga Sawung

Agus Basuki selaku Kepala Desa Cukir saat dikonfirmasi melalui seluler marah-marah dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas, sambil melontarkan kata kasar "Tulisen sakarepmu cuk", jumat (9/5/2025).

Perkataan itu sangat menyenggung profesi seorang jurnalis padahal bertujuan untuk konfirmasi agar diberikan informasi yang benar terkait proyek Dana BKK di desa tersebut.

Jadi sebenarnya seorang Kepala Desa harusnya memahami dan menerapkan aturan sopan santun serta menghargai orang lain. Sebagai pemimpin, kepala desa berperan sebagai teladan bagi masyarakat dalam menjaga etika dan norma kesopanan yang penting untuk membangun hubungan harmonis dan menciptakan lingkungan desa yang kondusif. Sopan santun merupakan kunci menciptakan hubungan yang baik.

Kode etik kepala desa bertujuan untuk mengatur perilaku dan tindakan kepala desa agar tetap profesional, netral, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan umum, menghindarkan konflik serta menjunjung tinggi etika dan berinteraksi dengan masyarakat umum.

Sementara Camat Diwek ketika mau dimintai tanggapan atas perilaku dan tindakan Kepala Desa Cukir tersebut tidak ada di tempat. (Tok)

DPRD Gelar Sidang Paripurna Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2025-2030



Sidang Paripurna DPRD Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2025-2030. (ashar)

MAGETAN, BN - Seusai pelantikan Nanik R & Suyatni Priasmoro sebagai Bupati dan Wakil Bupati Magetan masa bakti 2025- kemarin (23/3) di kantor Gubernur Jawa Timur. Meskipun masih ada waktu beberapa hari sesuai ketentuan tahapan pemilihan yang berlaku, akhirnya pada hari Senin 26/5 di gedung Paripurna DPRD Magetan telah diadakan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Magetan masa bhakti 2025-2030 yang dihadiri Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, jajaran Forkopimda, kepala OPD Pemprov dan Kabupaten Magetan, anggota DPRD, TNI-Polri, tokoh masyarakat, ormas, hingga media dalam rapat paripurna tersebut, ada Penyampaian Visi Misi Bupati & Wakil Bupati masa jabatan 2025-2030.

Nizhamul sebelumnya menjabat PJ Bupati Magetan menyerahkan tumpukan kepemimpinan Kabupaten Magetan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Seusai serah terima jabatan, Suratno ketua DPRD dalam pidato nya, menyampaikan bahwa berdasarkan perundang- undangan dan peraturan yang berlaku, setelah selesai serah terima jabatan bupati, maka kewajiban bupati untuk menyampaikan visi misi di dalam rapat paripurna yang terbuka untuk umum. Dalam sambutannya Nanik mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah atas kehadiran malam ini.

Dalam rapat paripurna DPRD Magetan, Senin (26/5), keduanya menyampaikan visi-misi pembangunan lima tahun ke depan, dengan mengusung semangat Magetan Aman, Maju, dan Berkelanjutan.

Penyampaian visi misi oleh Nanik Endang R sebagai bupati masa bakti 2025-2030 ada 7 misi pembangunan yang akan dituangkan & diterapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah) 5 Tahunan.

7 misi pembangunan yang disampaikan Bupati Nanik Endang R, selain membangun SDM yang andal dan Berdaya Saing kuat, sektor pertanian pun dikembangkan dengan mendorong hilirisasi, Produk unggulan berbasis UMKM dan Koperasi memegang peranan penting dalam memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.

Membangun Birokrasi Pemerintah yang profesional, adaptif dan transparan juga di sentuh dalam pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan membangun wilayah

kedepannya dapat meningkat kesejahteraan."

Bupati dalam penyampaiannya. Tidak lupa bupati dalam penyampaiannya, Pe-ningkatan da-ya tarik investasi, ekonomi

kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan dalam menurunkan pengangguran untuk itu juga perlu Membangun Infrastruktur Strategis untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Akhir kata Nanik Endang R Bupati Magetan mengutarakan dalam penyampaiannya, Membangun kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenram berdasarkan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau.(Ashar)

Desa Kedungsumber dan Kedungsari Bojonegoro Terima Sosialisasi Program Perhutanan



Sosialisasi dari Cabang Dinas Kehutanan Bojonegoro, Dirjen PSKL Jawa Timur dan BBWS pada hari Rabu (28/05/2025) di Pendopo Balai desa Kedungsumber.

cabut kembali," ucapnya.

"Jadi pada intinya Pemerintah mempunyai maksud dan tujuan ingin mensejahterakan masyarakatnya lewat Perhutanan sosial namun jangan sampai mengubah fungsi hutan. Jadikan hutan ini lestari kembali dan manfaatkan sumber dayanya untuk mencapai kesejahteraan," harapnya.

Sementara, Ir. Kardi Kepala Desa Kedungsumber juga menandaskan bahwa, "Kita harus selalu menjaga lingkungan kita khususnya Wilayah Hutan yang kini menjadi Hak Kelola Hutan Desa. Mari kita manfaatkan hutan Desa Seluas 600 hektar ini sebagai sumber menambah kesejahteraan hidup," cetusnya.

Dikatakan, "Apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya harus kita kerjakan. Jangan ambil manfaatnya saja namun kewajibannya juga

harus kita seimbangkan supaya tidak jomplang antara hak dan kewajiban. Masih banyak hal - hal yang harus kita kerjakan di dalam pengelolaan Kawasan hutan desa termasuk salah satunya pemasangan patok tanda batas luar dan patok pemanfaat antara yang satu dengan lainnya supaya jelas batas - batasnya. Secepatnya akan Kami lakukan itu dan apabila masih banyak yang belum kami ketahui, kami siap untuk menerima bimbingan dan arahan dari Dinas terkait," urainya.

Dalam sosialisasi ini dihadiri Forpincam Temayang, Dua BKPH Tretes dan Temayang, KUPT Pertanian Temayang, CDK Bojonegoro, BBWS Bojonegoro dan warga dua desa Kedungsari dan Kedungsumber sebagai Pemanfaat langsung Hutan desa di wilayahnya. (pri)

Dugaan Pungli Mirip Lingkar Setan Marak di SMAN Kabuh



□ UPT Diknas Provinsi Jatim Cabang Jombang Diduga Kecipratan Uang Haram ?

JOMBANG, BN – Di tengah persoalan keterbatasan akses, hampir semua sekolah SMAN/SMK di Kabupaten Jombang yang merupakan institusi pendidikan tempat siswa menimba ilmu dan mengasah nilai integritas, diduga masih terkontaminasi praktik Pungli (pungutan liar).

Mirisnya, sejumlah kasus Pungli di sekolah yang sudah di ketahui oleh UPT

bahkan di biarkan. Pertanyaan nya, apakah mereka dapat bagian uang haram dari hasil pungli tersebut?

Menurut Totok, Ketua DPD MIO (Media Independen Online) Jombang, "Pungli adalah perilaku korupsi yang perlu dilawan. Pungli di sekolah akan membuat akses pendidikan menjadi mahal. Tidak menutup kemungkinan pungli dapat mengakibatkan putusnya akses warga terhadap pendidikan. Lebih parah lagi ,pungli dan segala bentuk korupsi di sekolah dapat membuat peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa semakin akrab dengan perilaku korupsi," ungkapnya.

Pungli, lanjut tokoh Jombang ini, merupakan tindak kejahatan yang bisa kita lawan. Siapapun bisa dan punya peran melawan pungli. Pelajari seluk beluk pungli dan peluang untuk melawannya.

Seperti yang diduga terjadi di SMAN Kabuh, Kabupaten Jombang. Saat itu Kepala Sekolah SMAN Kabuh Ba'i diduga sengaja menghindar ketika kedatangan Wartawan Bidik Nasional (BN) di tempat kerjanya.

Kepala SMAN Kabuh mungkin sudah paham atas kedatangan Wartawan, sehingga cepat- cepat menghindarinya. Karena takut ada sebuah pertanyaan bersifat sensitif terkait isu pungli di SMAN Kabuh.

Informasi yang di terima oleh Bidik Nasional (BN), Pungli terkait Adanya pembayaran uang gedung Rp 4 juta, selain itu masih ada lagi pungli sehingga BN pun turun langsung ke sekolah SMAN Kabuh untuk menggali informasi lebih lanjut dengan menemui Ba'i selaku kepala sekolah, namun sangat disayangkan kepada sekolah diduga sengaja menghindar.

Sementara menurut informasi yang diterima BN, bahwa selain pungli uang gedung senilai 4 jt per siswa, masih ada lagi modus pungli Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga pengambilan ijazah, pungli terkait ujian, surat keterangan lulus, pembelian buku, seragam dan lainnya dengan pembelian yang tidak wajar.

"Pungli di sekolah tersebut seperti lingkaran setan, karena tindakan ini menciptakan sebuah siklus yang sulit untuk di hentikan. Setiap kali pungli dilakukan, ia memperkuat persepsi bahwa praktik tersebut dianggap sah dan wajar. Sehingga mendorong lebih banyak pungli yang memberatkan siswa," kata sumber itu. (Tim)

Kabag Umum Jombang Diduga Langgar UU KIP, Konfirmasi Media Tak Pernah Dibalas



JOMBANG, BN – Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Jombang Plt.Kabag Umum seharusnya mengedepankan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008. Undang- Undang ini mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Berbagai sumber dihimpun BN, patut dicurigai Plt Kabag Umum Yudha ada dugaan tidak menghiraukan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman, kurangnya sangsi yang tegas dan mungkin juga adanya retensi terhadap keterbukaan.

Padahal keterbukaan Informasi Publik menjadi kewajiban sekaligus tolak ukur transparansi pemerintahan.

Dimana setiap Badan Publik, khusus nya instansi pemerintahan wajib memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai perundang - undangan yang berlaku.

Sementara menurut informasi salah seorang wartawan yang ada di Jombang, Ingin menemui Plt. Kabag Umum sulitnya minta ampun,Di telpon nggak di angkat,di Whatshaap (WA), eggak dibalas. "Ini pejabat yang rela publik apa, kok beda dengan yang dulu," ungkapnya kepada Bidik Nasional (BN).

"Ini menunjukkan kran publik di Kabag Umum Pemkab Jombang diduga sengaja dibantu karena takut anggaran kegiatan nya dari tahun ke tahun takut jadi bahan pertanyaan," duga wartawan senior tersebut. (Tok)

Pemkab Sumenep Siap Optimalkan Pelayanan Umum

□ Bupati Sumenep Achmad, Fauzi Wongsojudo : Pemkab Sediakan Call Pusat

SUMENEP, BN - Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka pusat pelayanan pengaduan masyarakat yang berkaitan persoalan dibawah naungan pemerintah. Sering kali terjadi kasus kebakaran, kekeringan dalam artian musim kemarau panjang dan lain-lain yang bisa pemerintah Kabupaten untuk membantu.

Kata Bupati Sumenep Achmad, Fauzi Wongsojudo Pemkab menyediakan Call Pusat untuk pelayanan masyarakat umum bisa meringankan kendala yang dihadapi kena musibah, tetapi kita harus waspada dalam bekerja didarat maupun di tengah laut karena musibah bukan rencana manusia akan tetapi yang Maha Pencipta yang merencanakan.

Bagi aduan Call pusat harus jelas nama, alamat dan motif,



Bupati Sumenep Achmad, Fauzi Wongsojudo. (ist)

agar persiapan tim dari Pemerintah Kabupaten mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk dibawa pada yang kena musibah dan untuk Tim Damkar siap 24 jam pelayanan masyarakat yang terdampak musibah di lapangan.

Lanjut Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, Call 112 bisa menjadi solusi cepat dan efektif, agar tepat, cepat dan tanggap direspon oleh pihak yang bertugas yang berkaitan kebutuhan yang harus dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Hal diatas menjadi program Pemerintah Daerah melakukan bantuan layanan publik melalui teknologi informasi bentuk yang nyata, untuk masyarakat Sumenep, sehingga masyarakat tidak dibebani dalam kesulitan yang terjadi. (yus)

Kalaksa BPBD Banyuwangi: Cuaca Ektrim, Nelayan Diminta Waspada

BANYUWANGI, BN - Utamakan visi misi penyelamatan dan pertolongan di kebencanaan, (Kalaksa) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuwangi Danang Hartanto berkomitmen fokus dalam pertolongan dan penyelamatan kebencanaan.

"Kami mengharapkan bagi para nelayan, memang saat ini kondisi cuaca cukup ekstrim, dan kita tahu semua di musim kemarau, tetapi ini masih ada hujan yang cukup ekstrim, diimbau untuk para nelayan harus berhati-hati, terutama cuaca, kalau memang sudah angin ken-



Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuwangi Danang Hartanto bersama wartawan BN. (ist)

gan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat," cetusnya. (Dj)

ngan TNI - POLRI, Satpolairud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal

Pemain BBM Subsidi Tegal Terkesan Kebal Hukum, Polisi Datang Barang Bukti Raib



Diduga pemain BBM subsidi ketika dikonfirmasi wartawan dan truk yang diduga digunakan mengangut BBM dari SPBU. (dikin)

TEGAL, BN - Berawal dari aduan masyarakat adanya kegiatan ngangsu dan penimbunan BBM subsidi jenis solar dan Pertalite. Untuk memastikan kebenarannya informasi tersebut, wartawan bidiknasional.com (bn.com) bersama wartawan dari media lainnya melakukan investigasi tepatnya di Desa Jatimulya RT 05 RW 04, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Kamis 22/5/2025 pukul 14.23 WIB

Pada waktu investigasi, wartawan menemukan barang bukti puluhan jerigen sudah berisikan BBM subsidi jenis Solar juga Pertalite, satu unit truk warna orens

Nopol - G 1501- LP yang diduga digunakan untuk ngangsu solar di SPBU. Wartawan juga melihat ada aktivitas baru selesai nyedot solar dari tangki dipindah ke dalam Jerigen.

Saat dikonfirmasi awak media, 2 orang yang diduga pengangsu solar mengelak bahwa dirinya ngangsu solar subsidi untuk dijual ke petani. Selanjutnya tim media meninggalkan tempat yang diduga untuk menimbun dan menuju ke Polsek Surodadi dengan maksud melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dengan menunjukkan bukti dokumentasi foto dan video.

Setelah menunggu ham-

pir 1 jam pihak Polsek bersama rekan-rekan wartawan mendatangi tempat yang diadukan, namun sangat disayangkan karena lamban dalam menangani aduan masyarakat. Setibanya di lokasi barang bukti puluhan jerigen solar ternyata sudah dihilangkan, tapi masih ada barang bukti 3 jerigen pertalite dan 1 unit mobil truk yang diduga digunakan untuk ngangsu solar sudah diganti Nopol yang sebelumnya Nopol G -1501- LP dirubah menjadi Nopol G-8308-LZ. Modusnya jelas mobil truk diganti plat nomor dan barcode untuk ngangsu solar SPBU.

Dua Anggota Polsek Surrodadi tidak berani mengambil langkah tegas padahal jelas masih ada barang bukti pertalite 3 jerigen dan pemalsuan data nopol Truk yang diduga digunakan untuk ngangsu solar. Sangat disayangkan pihak Polsek tidak mengambil langkah tegas hanya menyarankan agar rekan media melapor ke Polres.

Melihat kejadian tersebut, tentunya masyarakat menduga bahwa kegiatan tersebut sudah ada pengondisian dan pembiaran, ka-

rena pihak polsek tidak mengambil langkah tegas apa pun.

Perlu diketahui bahwa Pemalsuan nomor polisi (nopol) atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bisa diperlakukan dengan beberapa pasal, yaitu Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan Pasal 480 KUHP tentang penggunaan dokumen palsu.

Pasal 263 KUHP: Menjelaskan tentang pemalsuan dokumen secara umum, termasuk pemalsuan plat nomor. Ancaman hukuman untuk pemalsuan dokumen ini adalah penjara paling lama 6 tahun.

Pasal 480 KUHP: Aturan tentang penggunaan dokumen palsu, termasuk plat nomor palsu. Menggunakan plat nomor palsu dapat dikennen sanksi pidana se-suai dengan pasal ini.

Pelanggaran Lalu Lintas: Penggunaan plat nomor palsu juga merupakan pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi berupa denda atau kurungan maksimal 2 bulan. Kami rekan media berharap pihak Paminal Polda Jateng segera melakukan penyelidikan terkait kinerja Polres Surodadi Kabupaten Tegal Jawa Tengah. (Dikin)

PDAM Tirta Prabawa Mukti Pangandaran Targetkan Cakupan Layanan 60 Persen

PANGANDARAN, BN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabawa Mukti Pangandaran terus berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih kepada masyarakat. Saat ini, PDAM menargetkan cakupan layanan bisa mencapai 60 persen, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pelanggan dalam mengakses layanan.

Menurut keterangan Kasubag Umum PDAM Pangandaran, M.H. Arif, langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap air bersih, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan sektor pariwisata.

Hal tersebut diperkuat oleh Direktur PDAM Tirta Prabawa Mukti Pangandaran, Agus Teguh Suryaman, S.H., S.KH., yang menjelaskan bahwa hingga saat ini jumlah pelanggan PDAM telah mencapai 3.910 sambungan, meningkat dari sebelumnya yang hanya 2.800 sambungan.

"Terkait pengembangan Perumdam Tirta Prabawa Mukti kabupaten Pangandaran tahun 2025 kedepan kita fokus pada peningkatan layanan makanya kami pada tahun 2025 memprogramkan layanan prima, kualitasnya dijamin 24 jam kontinuitas dan terakhir keterjangkauan semuanya ini sedang kami racik dan kami olah bagaimana memberikan layanan yang prima buat konsumen dan kami sedang fokus pada peningkatan kualitas sekarang ini kami sedang finalisasi kerjasama be to be dengan pihak swasta dan pihak BUMN bekerja sama dengan kami di tahun 2025, kami

Warga Dusun Sukamahi Kompak Renovasi Jembatan Secara Swadaya



Warga Dusun Sukamahi RT 02/RW 01, Desa Sukadana, Kecamatan Compreg, Kabupaten Subang, saat gotong royong renovasi jembatan. (Ahmad sehu)

aktivitas harian.

"Kami bersama warga sepakat untuk melakukan perbaikan ini secara gotong royong. Dana dan tenaga semua murni dari masyarakat. Alhamdulillah, semangat kebersamaan ini luar biasa," ujar Wakil Iwan.

Warga tampak antusias terlibat langsung, mulai dari proses pembongkaran jembatan lama, pemasangan rangka besi, hingga pengeringan pengecoran. Kaum muda, orang tua, hingga para sesepuh ikut berpartisipasi, membuktikan bahwa semangat kebersamaan masih menjadi ruh kehidupan desa.

Dengan adanya perbaikan ini, masyarakat muncul dari kesadaran bahwa ini inisiatif renovasi ini merupakan hasil kerja keras warga akan pentingnya infrastruktur yang layak dan aman digunakan, dan menjadi

simbol nyata dari kekompakkan warga Dusun Sukamahi.

(Ahmad sehu)

BBWS Citanduy Bangun Jalan Rabat Beton Dusun Pahonjean

CILACAP, BN - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) OP 2 menindaklanjuti permohonan warga dengan melaksanakan pembangunan jalan rabat beton di Dusun Pahonjean, Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses jalan warga dan mendukung kegiatan pertanian serta ekonomi masyarakat setempat. Pembangunan jalan rabat beton terdiri dari dua bagian, yaitu: Jalan sepanjang 162 meter dengan lebar 1 meter dan ketebalan 20 cm Jalan sepanjang 20 meter dengan lebar 2,5 meter dan ketebalan 20 cm. Pelaksanaan pekerjaan ini diperlakukan kepada Yuli yang terlibat

Desa Cimenga Bangun Kemandirian Ekonomi Lewat BUMDes dan Koperasi Merah Putih



Kepala Desa Cimenga Nana Rukmana. (Ed)

KUNINGAN, BN - Desa Cimenga, yang terletak di Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, menjadi salah satu contoh nyata desa yang tengah bertransformasi menuju kemandirian ekonomi melalui optimasi potensi lokal. Di bawah kepimpinan Kepala Desa Nana Rukmana, berbagai terobosan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembentukan Koperasi Merah Putih.

Dengan visi yang kuat untuk menjadikan desanya sebagai desa mandiri, Kepala Desa Cimenga mengalokasikan 20 persen dari Dana Desa secara khusus untuk mendukung usaha-usaha produktif berbasis potensi lokal. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung sektor unggulan seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayur-sayuran nabati, serta layanan jasa keuangan Brilink, yang semuanya dikelola secara profesional melalui BUMDes.

BUMDes Cimenga yang diberi nama Yuda Mandiri menjadi motor utama penggerak ekonomi desa. Dalam struktur organisasi yang solid dan transparan, BUMDes ini dipimpin oleh: Ketua: Dede Yunanda, Sekretaris: Pandu, Bendahara: Ibnu.

Dengan prinsip pengelolaan yang partisipatif, BUMDes Yuda Mandiri tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari bawah. Usaha peternakan ayam petelur, misalnya, kini mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi sumber pendapatan alternatif bagi banyak keluarga.

Sementara itu, langkah strategis lainnya diambil dengan pembentukan Koperasi Merah Putih Cimenga, sebagai wadah ekonomi rakyat yang berbasis gotong royong. Koperasi ini lahir dari semangat kebersamaan dan keinginan warga untuk memiliki lembaga ekonomi yang dikelola oleh dan untuk anggota.

Struktur pengurus Koperasi Merah Putih Cimenga hasil musyawarah warga dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terdiri atas: Ketua: Ahdi, Sekretaris: Sinta, Bendahara: Ayu, Ketua Bidang Keanggotaan: H. Idik, Ketua Bidang Usaha: Kusmana. Selain itu, dalam semangat demokrasi desa, posisi Wakil Ketua Bidang Umum dan Usaha juga dibentuk melalui musyawarah dan mufakat, mencerminkan semangat partisipatif dalam tata kelola koperasi.

Koperasi Merah Putih menerapkan aturan tegas berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai fondasi hukum dan etika. Keanggotaan koperasi diperkuat melalui sistem simpanan: Simpanan pokok: Rp 50.000 (satu kali), Simpanan wajib: Rp 20.000 (per bulan), Simpanan Manasuka: tanpa batas.

Langkah ini menjadi landasan penting untuk menjamin keberlangsungan usaha koperasi dan menguatkan rasa memiliki di kalangan anggota.

Ketika temui di Ruang Kerjanya Kepala Desa Cimenga Nana Rukmana menegaskan bahwa keberadaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih adalah strategi jangka panjang dalam membangun kemandirian desa. Menurutnya, desa tidak bisa terus bergantung pada bantuan, tetapi harus memiliki sistem ekonomi lokal yang tangguh dan berdaya saing. Selasa (27/5/2025).

"Kami ingin masyarakat Desa Cimenga tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku utama. BUMDes dan koperasi ini menjadi alat perjuangan ekonomi kita bersama," tegas Nana.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah desa, semangat gotong royong warga, dan transparansi dalam pengelolaan, Desa Cimenga kini optimis menatap masa depan. Langkah-langkah konkret yang diambil ini diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dalam membangun kemandirian ekonomi dari akar rumput.

Desa Cimenga bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun jiwa wirausaha dan kebersamaan di tengah masyarakatnya. Di tengah tantangan zaman, desa ini membuktikan bahwa kunci kesejahteraan terletak pada kemandirian dan keberianan untuk berinovasi. (Ed)

April, Pendapatan Daerah Pangandaran Naik 38,73 Persen



Penjabat Kepala Bidang BAPENDA Pangandaran, Asep Rusli. (ist)

PANGANDARAN, BN - Pemerintah Kabupaten Pangandaran mencatat adanya peningkatan signifikan dalam pendapatan daerah hingga bulan April 2025. Kenaikan tersebut mencapai 38,73 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penjabat Kepala Bidang BAPENDA Pangandaran, Asep Rusli, saat dikonfirmasi di kantornya pada Rabu, 28 Mei 2025, menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah per April 2025 mencapai Rp 29,1 miliar. Angka ini meningkat sebesar Rp 8,1 miliar dibandingkan bulan April 2024 yang tercatat sebesar Rp 21 miliar. "Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak,"

ujar Asep.

Meski mencatatkan tren positif, Asep mengungkapkan bahwa dari target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp 110,3 miliar, baru terrealisasi sebesar 26,42 persen hingga bulan April. Untuk mengejar target tersebut, Asep menekankan pentingnya konsistensi dalam pengawasan dan pelayanan, terutama dalam pelaksanaan optimalisasi pajak daerah.

"Langkah-langkah strategis dan pengawasan yang ketat terus kami lakukan untuk memastikan pendapatan daerah dapat terus meningkat dan target akhir tahun bisa tercapai," tambahnya.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara OPD pengelola pajak dan stakeholder terkait guna mendorong peningkatan pendapatan demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Asep sujana)



Jalan rabat beton yang dibangun BBWS Citanduy. (asep)

antusias dan penuh semangat dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Salah seorang warga Dusun Pahonjean, Darimin (45 tahun), menyampaikan apresiasi atas pembangunan tersebut. "Kami sangat berterima kasih kepada BBWS Citanduy. Jalan ini sangat membantu kami dalam beraktivitas, terutama saat musim hujan," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, meningkatkan koneksi antar wilayah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Dusun Pahonjean. Terima kasih BBWS Citanduy dan pemerintah daerah desa yang telah merealisasikan pembangunan ini. (ASEP SUJANA)

BLK Kediri Gelar Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue 1 Untuk Warga Desa Pikatan Wonodadi Blitar



Pelatihan pembuatan roti dan kue-1 di Kantor Balai Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang digelar BLK Kediri Pelatihan ditikuti 16 peserta dimulai 29 April sampai 19 Mei 2025. (ist)

BLITAR, BN - Balai Latihan Kerja (BLK) Kediri melalui Dwi Andayani selaku Koordinator Pelatihan di Wilayah Blitar melaksanakan

sampai 19 Mei 2025.

Laily Umatul Khoiroh instruktur pelatihan pembuatan roti dan kue-1 menyampaikan, pelatihan membuat

pelatihan pembuatan roti dan kue-1 bertempat di Kantor Balai Desa Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Pelatihan diikuti 16 peserta dimulai 29 April

roti dan kue bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga Desa Pikatan Wonodadi Blitar dalam pembuatan produk roti dan kue.

"Program pelatihan yang diikuti 16 peserta, diberikan materi keterampilan mulai dari teknik dasar pembuatan roti dan kue, penggunaan alat, hingga pengenalan alat membuat kue. Mulai cara membuat kue keping, kue basah dan roti," ucap Laily.

Lanjut Laily materi yang diberikan mulai cara pengolahan, plating, kemasan dan cara manajemen modal pembuatan kue. Mulai dari harga baku, biaya tenaga dan harga jual yang diperhitungkan. "Jadi semua diajarkan agar memahami harga jual dan keuntungan yang didapat dari penjualan kue, ketika nanti membuka usaha sendiri," ujarnya.

Laily juga berharap setelah pelatihan ini mereka bisa buka usaha sendiri, terima pesanan kue dan bisa dititipkan di toko-toko agar menambah income keluarga dan membantu suami.

"Peserta yang lulus pelatihan akan mendapatkan dua sertifikat dari BLK Kediri dan sertifikat dari BNSP. Sertifikat BNSP merupakan bukti kompetensi yang diakui secara nasional," ungkapnya.

Sementara, salah satu peserta Diah Ayu warga Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Blitar



mengatakan motivasi ikut pelatihan membuat kue ingin menambah pengetahuan membuat kue kekinian. "Sebelumnya, sudah bisa membuat kue tapi masih kue jadul. Jadi ingin mendapatkan ketrampilan membuat kue yang modern," ungkapnya.

(adv/red)

BLK Kediri Gelar Pelatihan Servis Sepeda Motor Bagi Warga Desa Pikatan Wonodadi Blitar



Pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi yang digelar BLK Kediri di Sekretariat IKA PMII Dusun Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu (21/5/2025). Tampak peserta sangat senang dan antusias mengikuti pelatihan. (ist)

BLITAR, BN - BLK Kediri melaksanakan pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi berlangsung di Sekretariat IKA PMII Dusun Wonodadi Desa Wonodadi Kecamatan

Wonodadi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu (21/5/2025). Peserta pelatihan servis sepeda motor diikuti 16 peserta warga Wonodadi Blitar diajarkan sesuai 17

Pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi dimulai 29 April hingga 6 Juni 2025, Senin sampai Sabtu aktif masuk waktu pelaksanaan jam 08.00 pagi sampai 3 sore.

Arifin selaku Instruktur Teknik Sepeda Motor (TSM) dari BLK Kediri menyampaikan untuk pelatihan servis sepeda motor bagi peserta dari Wonodadi Blitar diajarkan sesuai 17

unit kompetensi dengan dibekali untuk motor matic bagian cvd dan overfull engine konvensional serta sistem pengapian CDI. "Jadi di luar topik injeksi tetap kita bekali semua peserta di Wonodadi," ucap Arifin.

Lanjut Arifin selain itu kita bekali pengenalan komponen-komponen yang ada di sistem injeksi baik genser maupun akuator. Pengenalan cara kerja sistem injeksi dan pengenalan scanner atau diagnostic stolnya untuk motor injeksi.

"Selanjutnya, untuk di Wonodadi kita bekali juga untuk overfull engine konvensional mengenai trans-

isi, kopling, pengapian, priston, mekanisme katub itu kita ajarkan. Itu yang membedakan pelatihan-pelatihan yang ada di luar," ujarnya.

Ditambahkan Arifin bahwa kebetulan ini program NPU tapi dibekali uji kompetensi. Jadi ada uji kompetensinya dari BNSP. "Nanti setelah selesai pelatihan selama 35 hari, akan ada uji kompetensi sesuai dengan skema, yaitu servis sepeda motor sistem injeksi 17 unit kompetensi yang diujikan," imbuhnya.

Arifin menuturkan setelah peserta mendapatkan pelatihan disini untuk peluang kerja ada sekitar 60

persen, ada yang buka bengkel sendiri dan melanjutkan bengkel milik orang tuanya. "Saya berharap anak-anak bisa sukses semua dan tentunya peningkatan ekonomi bisa lebih bagus," harapnya.

Sementara, salah satu peserta Burhan warga Desa Pikatan Kecamatan Wono-

dadi Blitar mengaku ikut pelatihan servis sepeda motor disini ingin menambah skillnya. "Dan rencananya ingin mengikuti kegiatan di bengkel untuk menambah ilmunya agar bisa berkembang dan membuka wirausaha sendiri," ujar Burhan.

(adv/red)



INFO DPRD KOTA BANDUNG

Komisi IV DPRD Kota Bandung Dalam Persiapan Disdik Terkait SPMB 2025/2026



Komisi IV DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja serta monitoring lapangan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bandung Tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

BANDUNG, BN - Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja serta monitoring lapangan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bandung Tahun 2025, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Selasa, 27 Mei 2025.

Rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Bandung bersama Plt. Kadisdik Kota Bandung, Dani Nurahman, dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV, H. Rizal Khairul, S.I.P., M.Si. Acara dihadiri pula oleh para anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung yakni, Aswan Asep Wawan; Christian Julianto Budiman; Elton Agus Marjan; drg. Susi Sulastri; Drs. Heri Hermawan, M.M., M.Pd.; H. Soni Daniswara, S.E; Eko Kurnianto W. S.T., M.Pmat.; M. Syahlevi Erwin Apandi; dan M. Reza Panglima Ulung.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono menjelaskan, kegiatan monitoring lapangan dan rapat kerja tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memastikan informasi sesuai rencana dari pelaksanaan SPMB Kota Bandung Tahun Ajaran 2025/2026. "Kita ingin mendalami sejauh mana persiapan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 yang telah dilakukan Dinas Pendidikan. SPMB secara umum kita ketahui ada empat jalur, dari mulai jalur afirmasi bagi murid Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), jalur domisili, jalur prestasi, dan jalur mutasi," ujarnya.

Iman Lestariyono mengatakan, untuk penempatan Afirmasi RMP saat ini telah memasuki tahapan penetapan hasil pemetaan dan permintaan. Para murid baru yang telah terdaftar dalam status Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi melalui jalur RMP.

Untuk proses penempatan jalur afirmasi kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) jenjang SMP telah selesai. Prosesnya dimulai dari pendaftaran bagi calon murid yang akan ditempatkan di SMP Negeri. Kuota penempatan RMP sebanyak 20 persen telah didata berdasarkan Data Pokok Pendidikan, kemudian diverifikasi oleh sekolah asal dan divalidasi oleh sekolah tujuan.

"Untuk afirmasi Kota Bandung, diawali dengan afirmasi penempatan RMP. Jadi mereka yang telah masuk dalam DTKS

didaftar melalui sistem untuk dilakukan penempatan afirmasi RMP di sekolah negeri terdekat, untuk memilih sekolah negeri mana, hal ini untuk mempermudah dan memberikan ketenangan bagi orang tua murid," ucapnya.

Dalam kesempatan kegiatan monitoring lapangan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bandung turut mengecek kesiapan lainnya dari pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, salah satunya kesiapan pelayanan administrasi terintegrasi, termasuk edukasi kepada calon peserta didik.

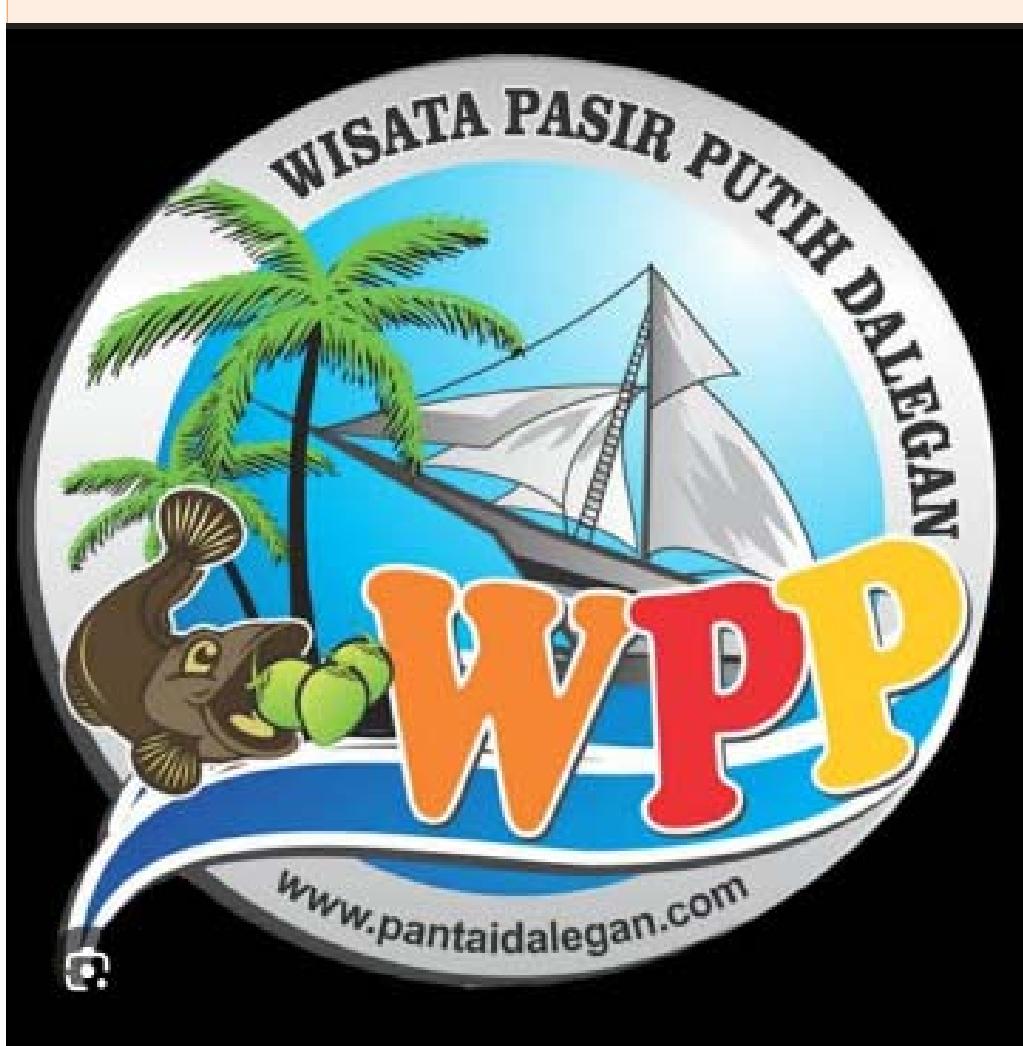
Terkait kesiapan pelayanan administrasi, Dinas Pendidikan telah mendirikan meja layanan terintegrasi SPMB bersama Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil dan Dinas Sosial, di halaman kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung. Para petugas dari masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut memberikan pelayanan administrasi satu pintu.

Iman Lestariyono menambahkan, adapun kendala yang kerap terjadi dalam proses pendaftaran SPMB adalah kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat untuk melakukan pembaharuan data identitas yang diperlukan. Seringkali saat waktu proses pendaftaran dibuka, kepanikan calon peserta didik terjadi untuk melakukan pembaharuan identitas.

"Dengan pola pelayanan administrasi satu pintu ini memudahkan masyarakat, sehingga calon peserta didik tidak perlu bolak-balik untuk melakukan urusan administrasi sana sini. Maka secara umum, dapat kami sampaikan persiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan sudah oke," tuturnya.

Meski demikian, Komisi IV DPRD Kota Bandung akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026. Terlebih tahapan pendaftaran untuk jalur domisili, prestasi, dan mutasi baru akan dilakukan pada 23-27 Juni 2025. Penempatan Jalur Afirmasi RMP melalui sistem sudah dilaksanakan dan sudah ada hasilnya di laman resmi spmb.bandung.go.id. Saat ini tahapan memasuki pendaftaran SPMB untuk semua jalur di antaranya Jalur domisili, Afirmasi, Prestasi, Mutasi yang dilaksanakan pada 19 Mei sampai 20 Juni 2025. Kemudian akan dilanjutkan pendaftaran di semua jalur pada 23-27 Juni 2025.

"Kita akan terus monitoring, karena proses pendaftaran secara online kan belum dimulai, kalau kick-off itu sudah untuk proses penempatannya, ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar," katanya. (Advan)



**Keluarga Besar
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri/Swasta
se-Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik
Mengucapkan
Selamat Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2025**

**"Semoga Penyelenggaraan
Pendidikan SD Negeri/Swasta Menganti Semakin Jaya"**

Maskuri, S.Pd. (Ketua)



Spektakuler!!!, 1000 Pelari Berpacu di Muara Enim Tourism Fun Run 5K

□ Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum :
Ini Sebagai Wujud Visi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA)

MUARA ENIM, BN - Kabupaten Muara Enim sukses menyelenggarakan kompetisi lari bertajuk Muara Enim Tourism Fun Run 5k yang dilepas dan diikuti langsung oleh Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., di Lapangan Merdeka Muara Enim, Minggu (18/05). Tak kurang 1000 pelari berpacu mengikuti ajang kompetisi lari bergensi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ini dalam rangka meningkatkan semangat berolahraga serta kunjungan wisata ke Bumi Serasan Sekundang.

ADAPUN ajang Muara Enim Tourism Fun Run 5k diikuti para atlet hingga seluruh lapisan masyarakat yang dimulai dan diakhiri di Lapangan Merdeka Muara Enim.

Ajang ini pun semakin meriah dengan dihadirkan pembagian medali, hadiah doorprize serta senam bersama. Pada



Berbagai momen kegiatan kompetisi lari bertajuk Muara Enim Tourism Fun Run 5k yang digelar Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sekitar 1000 pelari berpacu mengikuti ajang kompetisi lari bergensi ini. Tampak Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., saat melepas peserta lari dan memberi hadiah bagi pemenang di Lapangan Merdeka Muara Enim, Minggu (18/05).

kesempatan itu, Bupati menyampaikan Pemkab.

Muara Enim akan rutin menyelenggarakan

kegiatan olahraga yang melibatkan banyak

menuju Kabupaten Muara Enim sebagai tuan rumah

rta seperti halnya Muara Enim Tourism Fun Run 5K.

Menurut Bupati H. Edison, ajang demikian ini memberikan multi efek bagi daerah, salah satunya menggairahkan perekonomian masyarakat hingga sektor pariwisata.

Bupati H. Edison menegaskan, hadirnya kegiatan olahraga di Kabupaten Muara Enim juga dalam rangka mendukung kembangkan semangat berolahraga

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan Tahun 2027.

Selain itu, dalam mewujudkan visi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA), kedepannya dirinya siap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga di fasilitas publik dengan memberlakukan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day. Melalui upaya ini, diharapkan kesadaran tentang gaya hidup sehat dapat ditingkatkan menuju terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif dan berkualitas di Kabupaten Muara Enim. (ADV/ADI)



Komisi III DPRD Pinrang Gelar Rapat Bahas Aduan Warga Soal Sampah di Pekkabata

PINRANG, BN—Sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Komisi III DPRD Pinrang pada hari Rabu lalu di Kecamatan Duampuanua terkait aduan warga sekitar mengenai tumpukan sampah yang menutupi sungai. Komisi III menggelar rapat dengan pendapat (RDP) dengan mengundang pihak-pihak terkait, Senin, (26/5/2025), Pkl.10.00 wita, bertempat di ruang rapat Maseddi Ada, Kantor DPRD Pinrang, Sulawesi Selatan.



Rapat Komisi III DPRD Pinrang agenda Bahas Aduan Warga Soal Sampah di Pekkabata. (ist)

Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Supardi, SE didampingi Anggota Komisi III lainnya yakni, Hj. Rusnah, SE, Hasnur Asikin, Andry Muliadi, S.Sos, Drs.H. Muhammad Amir, Ilham dan A. Muhammad Fahmi Fahri. Turut hadir, Plt. Kadis Perkim-LH, DR. Syamsumarlin, Dinas Perindag, Lurah Pekkabata, Rusli, Lurah lampu, Dely, dan Ketua TPSR Pekkabata, Hairuddin.

Dalam kata pengantaranya, Ketua Komisi III DPRD Pinrang, Supardi, SE yang juga Ketua Fraksi Gerindra menyampaikan, sesuai pantauan di lapangan, memang sampah di Pekkabata sudah sangat memperihatinkan. Bukan hanya tumpukan sampah tersebut yang sudah menutupi sungai yang bisa menyebabkan banjir, akan tetapi bau yang menyengat juga sangat mengganggu keseharian warga sekitar dan ini bisa menjadi sumber penyakit.

Oleh karena itu, sambung Supardi, melalui RDP ini di harapkan bisa di temukan secepatnya solusi terbaik mengenai masalah sampah tersebut.

Hal senada disampaikan Hasnur Asikin, Anggota Komisi III yang juga legislator PKB dari dapil Kecamatan Duampuanua-Cempa. Menurutnya, jika tumpukan sampah tersebut tidak segera di benahi, Pekkabata bisa tenggelam, apalagi saat ini musim penghujan sehingga potensi banjir itu sangat besar.

"Saya berharap keseriusan pihak terkait menangani masalah sampah ini secepatnya. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut tidak ada penyelesaian. Kasiyan masyarakat di sana, sudah bau busuk yang menyengat, juga bisa menjadi sumber penyakit bagi warga sekitar," ungkap Hasnur Asikin.

Ilham, salah satu Anggota Komisi III yang juga legislator Partai Gerindra dapil Kecamatan Duampuanua-Cempa mengungkapkan, berdasarkan informasi dari masyarakat di sana, tumpukan sampah yang ada saat ini terjadi karena

Bupati Beltim Kamarudin Apresiasi Parade Drumband Jelang Kedatangan Shabrina Leanor



Bupati Beltim Kamarudin Muten bersama group drumband. (ist)

MANGGAR, BN—Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mengapresiasi lima group drumband di Kabupaten Beltim yang tampil pada parade kado Shabrina Leanor untuk masyarakat Kabupaten Beltim di Lapangan Yagor, Manggar, Jumat (30/5).

Penampilan para peserta

disaksikan oleh Bupati Beltim Kamarudin Muten, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim Dedy Wahyudi dan Ketua Persatuhan Drum Band Indonesia (PDBI) Kabupaten Beltim Rosly.

"Suatu kebanggaan kegiatan ini menampilkan adik-adik pelajar dengan formasi

drumband. Ini menjadi ajang untuk memperlihatkan bakat dan kemampuan mereka," ucapnya.

Para peserta itu berasal dari group drumband SD 1 Manggar, SMP 1 Manggar, SMP 3 Manggar, MTs 1 Manggar dan MTs Muhammadiyah Gantung.

Menurutnya, mereka berhasil memukau penonton dengan gerakan yang sinkron, harmonis serta irama yang dinamis dan energik. "Kita melihat bersama penampilan menarik adik-adik ini semuanya luar biasa memainkan drumband dengan cekatan dan energik," jelasnya.

Selain itu, penampilan semua drumband jelang kedatangan Shabrina Leanor pada Minggu, 1 Juni 2025

adalah bentuk hiburan yang meriah dan menarik bagi masyarakat Beltim.

Begitu juga yang disampaikan Ketua PDBI Kabupaten Beltim Rosly, ia berharap dengan adanya penampilan semua drumband ini akan memberikan spirit dan support bagi drumband di Kabupaten Beltim sehingga mencapai prestasi yang gemilang.

"Penampilan semua drumband selain dapat menjadi wadah untuk mengembangkan dan memajukan bakat dan kreativitas di bidang seni musik, juga menjadi sarana penggalian bibit-bibit atlet drumband yang berpotensi dan berprestasi," kata Rosly.

(diskominfobeltim/as)

Tanpa Anggaran, Gelaran Turnamen Sepak Bola Mini Sukses



Andi saat menerima trophy bergilir. (ist)

MANGGAR, BN—Skuad dan bersemangat, kondisi ini menggambarkan suasana Pertandingan Final Turnamen Sepak Bola Mini U-12 Tingkat Kabupaten Belitung Timur di Stadion Rimba Pelawan Kecamatan Damar, Rabu (28/5/25) sore. Meski di bawah guyuran hujan, baik

pemain dan penonton antusias ikut dalam turnamen ini.

Dalam pertandingan final ini, berhadapan Tim Sepak Bola SD Negeri 19 Gantung dengan Tim asal SD Negeri 10 Kelapa Kampit. Hasilnya, SD N 19 Gantung menang 2-0 atas SD N 10 Kelapa Kampit.

Kemenangan ini disambut sorak-sorai, pemaian dan para penonton yang mayoritas ibu-ibu. Beberapa pemain tampak sujud syukur, beberapa bahkan ada yang meneteskan air matanya.

Ketua Penyelenggara Turnamen Sepak Bola Mini, Andi Ardian mengungkapkan turnamen ini baru pertama kali digelar. Namun antusiasme peserta dan sekolah cukup tinggi untuk ikut dalam turnamen ini.

"Biasanya hanya sampai tingkat kecamatan, tahun ini baru pertama kita gelar untuk tingkat kabupaten. Semangat anak-anak untuk tanding sangat tinggi, bahkan yang dari sekolah pelosok, tak mau

(diskominfobeltim/as)

Silaturahmi Pemkab Beltim Dengan Wartawan Penuh Keakraban



Bupati Beltim didampingi Wakil Bupati, Khairil Anwar beserta Ketua DPRD Fezzi Uktolseja. Kepala Diskominfo SP, Bayu Priyambodi menjadi moderator dalam Silaturahmi dengan jurnalis dan wartawan di Kabupaten Beltim. (ist)

DPRD Beltim Fezzi Uktolseja. Kepala Diskominfo SP, Bayu Priyambodi menjadi moderator dalam kegiatan yang berlangsung selama empat jam ini.

Suasana silaturahmi berjalan santai dan penuh keakraban. Sebelum sesi dialog dan tanya jawab, para wartawan dijamu makan malam. Setelah itu, sambil menikmati pengasan dan minuman ringan, para wartawan mulai mengajukan pertanyaan dan saran kepada pemerintah. Tercatat 18 wartawan yang mengutarakan pertanyaan dan uneg-unegnya.

Pertanyaan seputar program kerja Pemkab Beltim. Namun ada pula yang meminta bantuan sarana dan kegiatan penunjang kemudahan wartawan saat melakukan liputan.

Seumua pertanyaan dan permintaan ditanggapi langsung oleh Bupati Beltim, Kamarudin Muten. Wakil Bupati dan Ketua DPRD juga ikut menanggapi sesuai porsinya masing-masing.

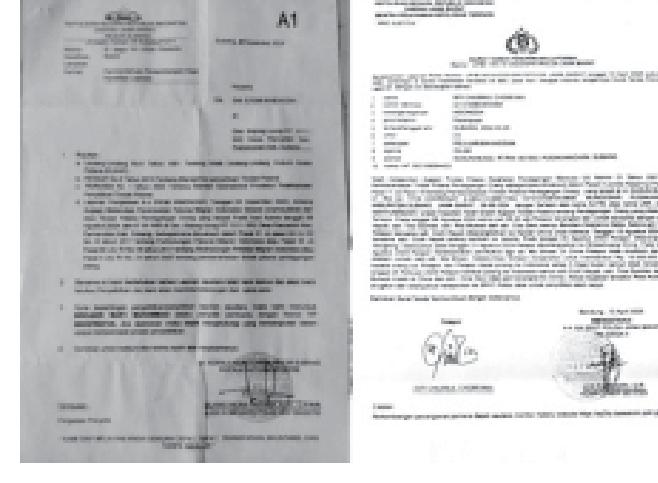
Bupati Beltim mengatakan kegiatan silaturahmi seperti harus rutin dilaksanakan, layaknya tiga atau empat bulan sekali. Afa, sapaan Kamarudin ingin agar wartawan dapat membantu menyebarluaskan program-program pembangunan.

"Tolong tulis berita yang benar, saya siap dikonfirmasi. Jangan sampai ada pemberitaan yang mendeskreditkan dan cenderung menjadi fitnah. Hal ini tidak baik bagi iklim investasi serta membuat buruk citra kita di luar daerah," pinta Afa.

Bagi Afa, wartawan dan media merupakan rekan strategis pemerintah, di mana harus diberikan ruang sebagai kontrol sosial. Untuk itu, Dia mempersilahkan untuk melaporkan jika ada temuan di lapangan baik terkait pelayanan pemerintah maupun oknum ASN yang tidak baik.

"Khusus untuk wartawan saya berikan sayembara, jika ada ASN yang pakai baju dinas di jam kerja berada di warung kopi, fotonya kirim ke saya. Saya kasih Rp 500 ribu," ujar Afa yang disambut tepuk tangan riuh para wartawan. (Diskominfobeltim/as)

Polda Jabar Usut Kasus Dugaan TPPO di Subang, Pelaku Janjikan Pekerjaan ke Tiongkok



SUBANG, BN—Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) tengah melaksanakan penyelidikan intensif terkait laporan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Subang. Kasus ini mencuat setelah laporan resmi disampaikan oleh mahasiswa asal Subang, Siti Chusnul Choiriyah, pada 10 April 2025 di SPKT Polda Jabar dengan nomor laporan LP/B/145/IV/2025/SPKT/POLDA JABAR.

Menurut keterangan dalam laporan, dugaan kasus ini bermula pada 08 Agustus 2024 di Dusun Bugel, RT 07 RW 02, Desa Pusakanagara, Kecamatan Mundusari, Kabupaten Subang. Dalam laporannya, pelapor mengungkap bahwa ada praktik perekruitmen tenaga kerja ilegal dengan modus menjanjikan pekerjaan di luar negeri, khususnya ke Tiongkok. Pelaku, yang diketahui bernama Wahyuningsih, diduga telah mengelabui korban dengan janji keberangkatan yang sebenarnya bernuansa eksploritasi.

Korban dalam kasus ini, Cich Hayati, diduga diberangkatkan ke Beijing dan kemudian dipindahkan ke Shijiazhuang tanpa kepastian terkait penempatan pekerjaan yang telah dijanjikan. Lebih jauh, pihak keluarga korban juga mendapatkan janji kompensasi sebesar Rp15 juta, namun kompensasi tersebut tak pernah terealisasi. Ditambah lagi, dalam proses keberangkatan korban, terduga terjadi pemalsuan dokumen dan manipulasi identitas guna memfasilitasi tindakan ilegal tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar telah menerbitkan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) dan segera melakukan rancangan penyelidikan. Sejumlah saksi, termasuk pelapor, telah dimintai keterangan untuk mengungkap rentetan peristiwa ini. Penyidik dari Reskrim Polda Jabar ditugaskan secara khusus untuk mengusut tuntas kasus ini guna mempercepat proses penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Adi Supadi, perwakilan keluarga korban, menyampaikan harapannya agar proses penyidikan segera menghasilkan keadilan. "Kami hanya ingin keadilan bagi keluarga kami. Kasus ini bukan yang pertama, dan kami percaya pihak Polda Jabar akan bersikap tegas dalam mengungkap pelaku di balik perdagangan orang yang menyengsarakan ini," ujarnya. (M.Tohir/Tim)

Direktur PDAM Bone Bachtiar Sairing Bertekad Maksimalkan Pelayanan Kepada Pelanggan



Wabup Bone Andi Akmal Pasluddin didampingi Kepala Bagian Prorokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bone, Andi Resky Pratama saat mengunjungi kantor PDAM Bone, di jalur Gunung Jaya Watampone, Senin (2/6/2025). Kunjungan disambut Direktur PDAM Wae Manurung Muh. Bachtiar Sairing. (Edys)

bup) Andi Akmal Pasluddin didampingi Kepala Bagian Prorokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bone, Andi Resky Pratama saat mengunjungi kantor PDAM Bone, di jalur Gunung Jaya Watampone, Senin (2/6/2025).

Kunjungan ini untuk merespon adanya informasi dari pelanggan PDAM Bone yang mengeluhkan pelayanan air ledeng yang sering macet serta kualitas air yang kurang memuaskan.

Direktur PDAM Wae Manurung Muh. Bachtiar Sairing, menjelaskan penyebab suplai air yang tidak lancar disebabkan banyaknya pipa PDAM yang sudah tua.

Menurut Bachtiar, pipa distribusi PDAM rata-rata telah berusia lebih dari 50 tahun sehingga sering mengalami kebocoran. "Banyak pipa yang sudah tua, sehingga rawan

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Cegah dan Tekan Stunting di Kecamatan Balik Bukit, DPC IPEKB Lambar Gelar Lokakarya Mini

LAMPUNG BARAT, BN - Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Stunting diukur berdasarkan tinggi badan anak dibandingkan dengan usianya. Anak yang tingginya berada di bawah batas ambang untuk usianya dianggap mengalami stunting dan akibatnya pertumbuhan sang anak mengalami keterlambatan atau terhambat.

Hal itu disampaikan Ketua DPC Ikatan Penyuluhan Keluarga Berencana (IPEKB) Indonesia Kabupaten Lampung Barat periode 2024-2028 Arin Fatmawati, S.I.kom dalam kegiatan Lokakarya mini yang di ikuti unsur pimpinan kecamatan (Uspika) Kecamatan Balik Bukit yang dipusatkan di Kantor Penyuluhan KB Kecamatan Balik Bukit di Lingkungan Pantau Kelurahan Pasar Liwa Balik Bukit, Selasa 3/6/2025.

Dalam kesempatan itu juga ia mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan pemeriksaan kesehatan rutin ke posyandu bagi anak-anak dan ibu hamil.

"Karena posyandu adalah UKBM dan puskesmas sebagai fasilitator sehingga diharapkan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan lintas sektor terkait," ujarnya.

Terusnya, Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan pertama maka Puskesmas harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjangkau masyarakat secara luas, "Saya berharap Puskesmas dapat meningkatkan



Kegiatan Lokakarya diikuti unsur pimpinan Kecamatan Balik Bukit yang dipusatkan di Kantor Penyuluhan KB Kecamatan Balik Bukit di Lingkungan Pantau Kelurahan Pasar Liwa Balik Bukit, Selasa 3/6/2025. (taufik)

kapasitasnya dalam menangani masalah kesehatan, termasuk stunting, melalui program-program yang terintegrasi dan berbasis data," kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program yang kita jalankan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Mari kita gunakan forum ini untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi yang telah kita temui dalam pelaksanaan program kesehatan," tandasnya.

Lokakarya itu dihadiri Sekretaris Kecamatan Balik Bukit, Yosta Sandi mewakili Camat M. Yones, Kepala Pukesmas Balik Bukit, Harjunadi dengan mengusung materi tentang Stunting dan Pencegahannya

Pemateri 2. Nafisah, S.Sos.I Penyuluhan Agama Islam KUA Balik Bukit membahas tentang program bimbingan perkawinan

Kapolda Balik Bukit yang diwakili Bhabinkamtibmas Kelurahan Way Mengaku, Danramil Balik Bukit yang diwakili Babinsa Kelurahan Pasar Liwa, perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balik Bukit yang diwakili Nafisah, S.Sos.I Penyuluhan Agama Islam membahas tentang program bimbingan perkawinan serta para penyuluhan KB Kecamatan Balik Bukit.

Dalam kegiatan Lokakarya itu peserta fokus membahas berkaitan dengan penurunan angka stunting di Kecamatan Balik Bukit, dengan cara menyamakan langkah dan gerak untuk tujuan yang sama yakni penurunan angka stunting di Kecamatan Balik Bukit. (taufik)

Disdukcapil Kuningan Tunjukkan Kinerja Prima, Pelayanan Cepat Pada Masyarakat dengan Sepenuh Hati

KUNINGAN, BN - Pelayanan publik yang prima menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan, yang belakangan ini menuai pujiwan atas respons cepat dan kesigapan dalam memberikan layanan administrasi kependudukan.

Dengan moto Disdukcapil Kuningan "DUKCAPIL BISA" !!! (BERKARYA, INOVATIF DAN INISIATIF, SABAR DAN SEMANGAT, ADAPTIF DAN AMANAH). Terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanannya. Mulai dari pengurusan KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran hingga pencatatan kematian, semuanya kini dapat diakses dengan lebih mudah, transparan, dan efisien. Kehadiran layanan digital, hingga pelayanan ramah difabel menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Helmi Johar, S.Sos., Disdukcapil Kuningan, mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas layanan merupakan hasil dari kerja sama tim, evaluasi berkala, serta dukungan dari masyarakat



Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Helmi Johar, S.Sos.

yang aktif memberikan masukan. "Kami berupaya hadir sebagai pelayan publik yang humanis, cepat, dan solutif. Kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama," ujarnya.

Apresiasi terhadap kinerja Disdukcapil ini pun datang dari berbagai kalangan. Salah satunya dari tokoh masyarakat sekaligus pentolan Gerakan Anti Maksiat (Gamas), Moriz, yang secara terbuka menyampaikan rasa bangganya terhadap perubahan positif yang terjadi.

"Saya melihat sendiri bagaimana masyarakat kini merasa lebih mudah mengakses layanan kependudukan. Tidak ada lagi keluhan berlarut-larut, dan ini menandakan perubahan yang signifikan. Disdukcapil Kuningan layak dijadikan contoh oleh daerah lain," ungkap Moriz di sela-sela Aktivitasnya, Selasa (3/6/2025).

Lebih lanjut, Moriz menilai bahwa sinergi antara teknologi, sumber daya manusia yang kompeten, serta kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi di tubuh Disdukcapil. Ia pun berharap agar capaian ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan dan berintegritas. (Ed)

Sebanyak 20 KPM di Pekon Bumijaya Lambar Terima Blt DD, Ini Harapan Camat Sukau

LAMPUNG BARAT, BN - Pemerintah Pekon (Desa) Bumi Jaya Kecamatan Sukau Lampung Barat melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2025. Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa yang dibagikan kepada 20 Keluarga yang masuk dalam Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tersebut sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap KPM untuk bulan Januari sampai dengan bulan April 2025. Kegiatan itu dipusatkan di aula kantor Peratin setempat, Rabu 23/5/2025.

Penjabat (Pj) Peratin (Kepala Desa) setempat, Ali Irawan dalam kesempatan itu menyampaikan penetapan ke 20 keluarga yang masuk dalam KPM tersebut telah melalui berbagai proses dan

investigasi di lapangan yang melibatkan para Kepala Pemangku (Kadus) dan aparatur pemerintah Pekon lainnya serta mendengarkan masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan Lembaga Himpunan Pemekoran (LHP).

Dalam kesempatan itu juga Ali Irawan menjelaskan dimana dari hasil verifikasi dan validasi sesuai kriteria yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa Tertinggal (PDTT) dan juga Peraturan Menteri Keuangan hanya 20 KPM yang benar-benar memenuhi kriteria dan disesuaikan dengan kuota anggaran.

Dalam kesempatan itu juga Ali Irawan berpesan kepada seluruh KPM untuk memanfaatkan bantuan dari pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya dan kedepannya ada peningkatan

kesejahteraan.

"Kami berharap bantuan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan juga dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat di Pekon Bumi Jaya," pesan sang Peratin.

Pemerintah Pekon Bumi Jaya juga selalu berkomitmen untuk terus melakukan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan, tutup Ali Irawan.

Sementara Camat Kecamatan Sukau, Juremi Yudi dalam arahannya menjelaskan bahwa pembagian BLT Dana Desa bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2025 ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat. (taufik)



Pj Peratin Ali Irawan saat memberikan bantuan BLT DD. (taufik)

Serahkan Bantuan Pada KPM, Peratin Rahmadi Minta Warga Gunakan Sesuai Kebutuhan



Peratin Rahmadi saat menyerahkan BLT DD. (taufik)

LAMPUNG BARAT, BN - Pemerintah Pekon (Desa) Heniarong di Kecamatan Luombok Seminung Kabupaten Lampung Barat melaksanakan distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap pertama di balai Pekon (Desa) setempat beberapa waktu yang lalu.

Dalam acara penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut, dihadiri Camat Luombok Seminung Erwin Ardiansyah Adiguna yang diwakili sekretaris Kecamatan, Peratin (Kepala Desa), Ketua LHP berserta anggota, Pendamping Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas Pekon setempat. Di Pekon (Desa) Heniarong, sesuai dengan ketentuan kreteria warga yang berhak mendapatkan bantuan uang yang bersumber dari Dana Desa tersebut terdapat 25 kepala keluarga yang tergabung dalam Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Dalam kesempatan itu Peratin (Kepala Desa) Rahmadi antara lain menjelaskan untuk tahap ini pemerintahan Pekon baru bisa merealisasikan BLT DD untuk bulan Januari sampai dengan Maret, yakni setiap KPM akan menerima Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu Rupiah). Pada kesempatan tersebut, Peratin juga berharap agar bantuan yang diterima dapat digunakan sebaik mungkin demi peningkatan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat. "Saya berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.

Sementara Camat Kecamatan Luombok Seminung, Erwin Ardiansyah Adiguna melalui Sekretaris Kecamatan dalam arahannya menjelaskan bahwa pembagian BLT Dana Desa bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2025 ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat.

"Kami berharap bantuan ini dapat digunakan dengan bijak oleh keluarga penerima manfaat untuk kebutuhan sehari-hari dan jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat," ujarnya. BLT DD merupakan program prioritas nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan langkah nyata Pemerintah Pekon Bumi Jaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terang Erwin Ardiansyah seperti yang dituturkan Sekcam. (taufik)

Ditjen KSDAE dan BBTNBB Dukung Upaya Pemkab Pesibar Buka Keterisoliran Way Haru

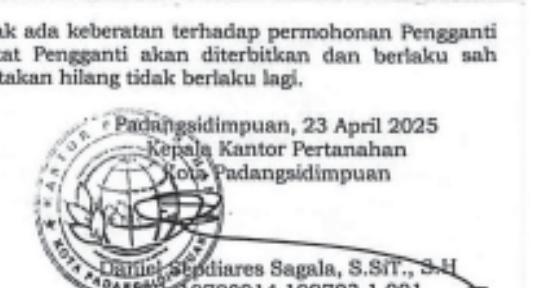


PESISIR BARAT, BN - Secara bertahap upaya keras Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan memperjuangkan untuk membuka keterisoliran dan memberikan kemerdekaan terhadap hampir 6000 jiwa masyarakat di Empat Pekon (Desa) wilayah Way Haru Kecamatan Bangkunut mulai membuahkan hasil nyata.

Hal itu disampaikan Bupati, Dedi Irawan dalam rapat koordinasi terkait upaya pembangunan jembatan, peningkatan badan jalan, dan jalur listrik menuju Way Haru yang dihadiri juga Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., serta diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di ruang rapat Bupati Lantai 4 Gedung Marga Sai Batin Kompleks Perkantoran Pemkab Pesibar, Rabu 28/5/2025.

Bupati, Dedi Irawan mengungkapkan berdasarkan Surat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Nomor: S.223/T.7/BIDTEK/KSA/B/05/2025 dan Memorandum Direktorat Jenderal (Ditjen). Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Nomor: M.49/KK/KSA.02/5/2025 kepada Kepala BBTNBB menjelaskan bahwa Pertama, pengerejan perbaikan jembatan gantung Way Pemerihan dapat segera dilakukan, dengan catatan pengawasannya dilakukan secara bersama oleh para pihak terkait. Kedua, terhadap pengerejan ruas jalan-jalan patroli sepanjang kurang lebih 10 KM serta pembangunan jembatan baru lainnya dapat diakomodir dari skema kerjasama sesuai Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 85 Tahun 2014 jo. Permen LHK Nomor 44 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. (Rilis/TAUFIK)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANGSIDIMPUN PROVINSI SUMATERA UTARA						
Jln. H.I.T. Rizal Nurdin Km. 7 Kompleks Perkantoran Pal IV Pijor Keling Kota Padang Sidempuan 22733, Telp. Fax. (0634) 28941, email: kantah_psp@yahoo.co.id						
PENGUMUMAN (Tentang Sertifikat Hilang) Nomor : 5 /2025						
Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :						
No	NAMA/ ALAMAT PEMOHON	TIKAT ATAS TANAH, JENIS DAN NO. HAK	NIB	TERDAFTAR ATAS NAMA	TANGGAL PEMBUKAAN	LETAK TANAH : a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan d. Kota e. Luas
1	Andy Novrianto Simamora	Hnk Milik No. 00662/ Wek I	00313	Muhammad Akhir Simamora	11-06-2013	a. - b. Wek I c. Padangsidiimpun Utara d. Padangsidiimpun c. 108 M ²
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.						
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertifikat tersebut diajas, maka Sertifikat Pengganti akan diberikan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.						



Dipindai dengan CamScanner

100 Hari Kepemimpinan SUKSES di Soppeng, Kebijakan Pro Rakyat Digenjot



Refleksi 100 Hari Kepemimpinan SUKSES di Soppeng.

SOPPENG, BN - Jumat, 30 Mei 2025, hari ini, duet Bupati sah Wakil Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE - Ir. Selle KS Dalle, telah memimpin Kabupaten Soppeng selama 100 hari. Sejak dilantik di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025, keduanya ternyata telah banyak menelurkan kebijakan pro rakyat yang sebagian diantaranya adalah janji kampanye. Meski pasangan ini sebenarnya tak pernah memastikan hasil kerja di 100 hari pertama memimpin.

Berikut sejumlah kebijakan yang dilakukan Pasangan SUKSES dalam 100 hari kepemimpinannya:

1. Kenaikan TPP ASN

Sejatinya, kenaikan TPP ASN bukanlah program andalan dari pasangan ini. Meski kerap disampaikan dalam berbagai kegiatan kampanye Pilkada, namun dalam visi misi dan Program kerja keduanya, kenaikan TPP tak dibahas dengan detail. "Tetapi, saya memutuskan memberikan kenaikan TPP untuk memacu motivasi kerja para ASN. Di awal memimpin ini, kami membutuhkan motivasi ASN untuk membantu kami melaksanakan semua program kerja," kata Suwardi.

2. Seragam, Sepatu dan Tas Gratis

Pasangan SUKSES memastikan pelaksanaan program seragam, sepatu dan tas gratis akan digelar pada tahun 2025 ini, tepatnya memasuki tahun ajaran baru 2025 - 2026. Meski mengalami pemangkas anggaran dalam APBD, keduanya tak surut untuk menghentikan program ini. "Kami tetap komitmen untuk melaksanakan program seragam, sepatu dan tas gratis, tahun ini juga. Meski kita tahu pusat melakukan pemangkas anggaran," kata Suwardi. Dana diambil dari hasil efisiensi yang dilakukan kegiatan.

menuju Desa Leworeng yang sudah lama mengalami kerusakan dan jalan lingkar di Kecamatan Lilitirau. Selain itu, tetap melanjutkan program pembangunan jembatan di Salokaraja dan Kessing, yang dipastikan akan selesai sebelum 2025 berakhir.

6. Pembangunan Sekolah Rakyat

Tak semua daerah mendapat jatah Pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Pemerintah pusat hanya akan membangun 100 lokasi tahun 2025 ini. Namun, Soppeng sukses memperoleh kepercayaan pemerintah pusat menjadi salah satu lokasi. Soppeng bersama Bone dan Makassar sukses meraih kepercayaan Kementerian Sosial karena kesiapan mereka. Suwardi - Selle bertemu dengan Menteri Sosial Syaifulullah Yusuf, pertengahan Mei ini dan langsung memaparkan proposal kesiapan mereka. Bahkan, Soppeng menjadi daerah tercepat dalam menentukan lokasi sementara seperti yang dipersyaratkan Kemensos sebelum bangunan baru dibuat. Lokasi sementara SR Soppeng menggunakan bekas Rumah Sakit Ajappang. Atas jatah Seolah Rakyat itu, maka investasi baru yang akan masuk ke Soppeng tahun 2025 ini berada pada kisaran Rp 100 - Rp 150 Miliar.

3. Listrik Masuk Sawah

Program Listrik Masuk Sawah adalah program andalan dalam kampanye SUKSES. Hal itu membuat program ini langsung menjadi sasaran utama keduanya. Berkali-kali keduanya melakukan pertemuan dengan pihak PLN dan hasilnya untuk tahun 2025 ini, telah ada sekitar 23 titik yang akan dibuat.

4. Rehabilitasi Sekolah dan Puskesmas

Hampir semua dana untuk infrastruktur pendidikan terkena refocusing oleh pemerintah pusat. Akibatnya, Soppeng sama sekali tak mendapat dana infrastruktur pendidikan. Namun, Suwardi - Selle, punya cara lain untuk mengatasinya.

"Makin banyak bangunan sekolah yang rusak. Kita tak boleh menyerah dengan adanya pemangkas anggaran," ujar Suwardi. Dalam pergeseran terbatas APBD 2025, tak kurang dari 19 sekolah yang mengalami kerusakan bangunan akan tetap diperbaiki. Sementara itu, ada 3 puskesmas pembantu yang dipastikan dibangun pada tahun 2025 ini. Dana ini diambil dari hasil pemangkas internal yang dilakukan oleh Suwardi - Selle, terhadap APBD 2025 yang tersisa.

5. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana DAK Fisik Jalan 2025, adalah program yang ikut terpangkas pemerintah pusat. Namun, SUKSES berkomitmen tetap membangun jalan dan jembatan sebelum tahun 2025 berakhir. Salah satunya, jalan utama

sebelumnya. Selain itu, Suwardi - Selle terus memperbaiki sistem manajemen keuangan rumah sakit. Dari utang ke pihak ketiga yang sebelumnya mencapai puluhan miliar kini tinggal tak lebih dari Rp 2 miliar.

9. Mempertahankan UHC Premium

UHC (Universal Health Coverage) Premium tetap dipertahankan di Soppeng. Kebijakan yang telah lama ditempuh oleh Soppeng ini dipertahankan Pasangan SUKSES di tahun 2025. Status UHC Premium adalah suatu bentuk jaminan kesehatan yang memberikan akses yang lebih luas dan komprehensif terhadap pelayanan kesehatan, di atas standar jaminan kesehatan dasar yang biasanya disediakan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sejumlah penyakit yang tak ditanggung BPJS dan tidak ada di daerah lain bisa diakses gratis oleh warga Soppeng seperti cuci darah, perawatan jantung dan perawatan jiwa.

10. WTP Keuangan ke-11 Kalinya

Kabupaten Soppeng kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2024. Pencapaian ini merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, menunjukkan komitmen kuat Kabupaten Soppeng dalam tata kelola keuangan yang baik dan transparan.

Sejatinya, hasil itu adalah upaya luar biasa dari pemerintahan sebelumnya, Andi Kaswadi Razak - Lutfi Halide. Namun, pemeriksaan BPK secara menyeluruh dilakukan pada Bulan April dan Mei 2025. Alhasil, tanpa komitmen kuat dari SUKSES Raihan prestasi itu tak mungkin dicapai. "Saya meminta para pimpinan OPD untuk memenuhi semua permintaan data BPK, tak boleh ada yang meninggalkan daerah dan segera memperbaiki jika ada kekurangan data dan laporan," kata Suwardi Haseng. (anwar p)

Ketua Tim Penggerak PKK Soppeng :

Semarak Zulhijjah, Refleksi Pengorbanan



Semarak zulhijjah Muslimah DPD Wahdah Islamiyah Soppeng

SOPPENG, BN - Bulan zulhijjah kembali menyapa umat Islam dengan keutamaan yang luar biasa. Bulan ini identik dengan idul adha atau hari raya kurban dan ibadah haji dimana semua ibadah tersebut membutuhkan pengorbanan di dalamnya.

Dalam rangka semarak zulhijjah Muslimah DPD Wahdah Islamiyah Soppeng menyelenggarakan kegiatan yang bertema "Zulhijjah Bulan Taqwa". Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 29/05/2025 di Gedung Serbaguna Lapatau Soppeng yang dihadiri oleh 468 peserta.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Hj. Suarni Suwardi Haseng Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng, dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Muslimah Wahdah Soppeng atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata kepedulian dan kontribusi organisasi dalam menyematkan bulan zulhijjah.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa bulan zulhijjah merupakan bulan refleksi pengorbanan, dimana didalam bulan ini terdapat hari-hari terbaik dalam setahun yang harus dimaksimalkan dalam beribadah.

dan penguan nilai-nilai tauhid dalam membangun masyarakat dan keluarga yang berakhhlak mulia.

"Akhir kata, mari kita jadikan momentum bulan zulhijjah ini sebagai waktu untuk memperbaik amal, memperkuat persaudaraan, dan menumbuhkan semangat pengorbanan," tutupnya.

Semarak zulhijjah merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan oleh Muslimah DPD Wahdah Islamiyah Soppeng, sebagai bentuk menyemarakkan syiar Islam dan menumbuhkan kesadaran kepada muslim untuk menyambut bulan zulhijjah dengan berbekal ilmu syar'i.

(anwar)

Warga OKI Temui KDM karena Anak Kena Narkoba, BNNK : Penanganan Penyintas Punya Prosedur Khusus



Kepala BNNK OKI, AKBPH. Gendi Marzanto, SH, MH. (ist)

BNNK OKI di Kayuagung

"Kami siap membantu secara gratis. Yang bersangkutan akan kami asesment dulu untuk menentukan tingkat ketergantungannya guna menentukan metode rehabilitasi, apakah rawat jalan atau rawat inap," ujar Gendi, Jum'at, (30/5).

Menurut Gendi, penanganan narkoba berbeda dengan kenakalan remaja biasa. Karena ada tahap serta perlakuan khusus yang harus diterapkan dalam proses rehabilitasinya.

"Ada proses detoksifikasi, treatment, terapi perorangan, terapi kelompok hingga konseling dan lain lainnya, yang dinilai lebih efektif untuk menangani seseorang yang sudah terkontaminasi oleh zat terlarang." Jelas dia.

Diakuinya, pendisiplinan anak-anak bermasalah bisa melalui barak militer, tapi untuk anak nakal yang sudah terjerumus memakai narkoba hrs memerlukan treatment khusus.

Gendi menekankan pengguna narkoba yang secara sukarela mendaftar untuk rehabilitasi ke Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak akan dipidana, melainkan akan direhabilitasi secara gratis.

"Ini sesuai dengan regulasi, di mana pemakai narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi, bukan lagi hukuman pidana penjara dan biayanya gratis di tanggung negara," tutup dia.

Gendi mengatakan sudah banyak warga OKI yang dilayani di klinik BNNK OKI. Sepanjang tahun 2024 lalu paparnya terdapat 37 orang penyalahgunaan telah direhabilitasi melalui BNNK OKI dengan rincian 30 orang penyalahgunaan yang direhabilitasi rawat jalan oleh BNNK OKI dan 7 orang penyalahgunaan yang direhabilitasi rawat inap/rujukan ke Balai Rehabilitasi BNN.

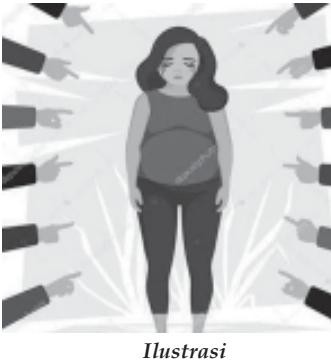
"BNN memiliki asesor dan konselor yang sudah sertifikasi yg bisa menentukan treatment mana yang tepat untuk diterapkan sesuai tingkat keparahan anak," ujar Gendi.

Dikatakannya, di bidang pencegahan, BNNK OKI telah melaksanakan advokasi melalui rakor, membangun jejaring, asistensi, intervensi, supervise, monev, bimtek, informasi dan edukasi.

BNNK OKI juga melaksanakan pencegahan melalui program remaja sebaya tahun 2024 yang dilaksanakan di lima sekolah. Yaitu, SMPN 1 Kayuagung, SMPN 5 Kayuagung, SMPN 6 Kayuagung, SMP IT Bina Insani dan MTS Manbaul Ulum Islamiyah.

Lebih lanjut dikatakannya, di bidang pemberdayaan masyarakat, BNNK OKI melaksanakan sosialisasi ke sekolah tingkat SMA dan SMK di OKI, termasuk di desa, dinas, kelurahan dan kecamatan serta perusahaan perkebunan. (Nurlis)

Isu Seorang Gadis Hamil di Desa Wonosari Karanganyar, Akhirnya Mulai Terkuak



Ilustrasi

namanya, Selasa 3 Juni 2025.

Ia mengungkapkan bahwa prihatin dengan adanya kejadian tersebut yang diduga dilakukan oleh EH oknum notaris tersebut, apalagi tahu bahwa oknum Notaris tersebut sudah mempunyai seorang istri. "Saya geram ingin membantu pihak keluarga korban agar kasus tersebut dibawa ke jalur hukum saja," tegasnya.

Masih menurut keterangan K, saya heran keluarga Korban tidak mau menempuh jalur hukum apa? Eh ternyata dari keterangan ayah korban sebut saja T karena diiming-imingi bahwa nanti setelah anaknya lahir akan dinihaki resmi dan sekarang sudah melakukan nikah siri. "Waktu hamil usia 4 minggu emang oknum Notaris tersebut diduga sudah nikah siri, emang isu santer di kalangan masyarakat sudah tau," terangnya.

Joko Kepala Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dihubungi media bidik nasional.com melalui telepon seluler dan via WhatsApp belum ada respon atau menjawab terkait isu tersebut. (dikin)

Lantik 33 Fungsional di Lingkup Pemkab Lambar, Sekda Nukman Minta Pejabat Bekerja Sesuai Regulasi



Sekda Nukman saat melantik 33 PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. (taufik)

LAMPUNG BARAT, BN - Sekretaris Daerah (Sekda) Nukman melantik 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam jabatan fungsional di Aula Kagungan Setdakab kompleks perkantoran Pemkab setempat, Rabu, 28/5/2025.

Ke 33 Pejabat fungsional yang dilantik tersebut terdiri dari 12 orang tenaga kesehatan, 3 orang auditor, 1 orang pengawas pemerintahan, 9 orang perencana, 3 orang jabatan penilaian perizinan dan 5 orang penata kelola pernamentan modal.

Dengan adanya pelantikan tersebut, Nukman berharap dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat terhadap pelayanan masyarakat. Nukman mengingatkan kepada 33 tenaga fungsional, sebagai ASN yang baik harus memiliki target kinerja dan capaian. "Itulah sebagai indikator dalam keberhasilan kerja sesuai dengan jabatan masing-masing," kata Nukman.

Mantan Penjabat Bupati Lampung Barat itu, menekankan kepada 33 tenaga fungsional yang baru saja di lantik agar bekerja dengan regulasi yang ada. "Karena Lampung Barat ini sudah terkenal dengan pegawai yang bekerja sesuai dengan regulasi di buktikan dengan mendapat WTP 15 kali berturut-turut, prestasi itu harus tetap kita jaga," tutup Nukman. (Taufik)

Bos Sritex ...

Dalam kasus tersebut, Kejagung sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka yaitu Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (2005-2022) Iwan Setiawan Lukminto (ISL), kemudian DS selaku pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020 dan ZM selaku Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta tahun 2020. Ketiga tersangka tersebut kini telah ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta.

Sementara itu, terkait ketujuh saksi yang telah dipanggil dan diperiksa, adalah sebagai berikut: 1) HP selaku Kepala Sub Divisi Commercial Banking Bank BPD Jateng, 2) DP selaku Perseroan Pengurus CV Prima Karya, 3) AZ selaku Legal Tim Hadipranto Hadinoto & Partners tahun 2007 sampai dengan 2017, 4) LW selaku Direktur PT Adikencana Mahkota Buana, 5) APS selaku Direktur PT Yogyakarta Textile, 6) IKL selaku Direktur Utama PT Sinar Pantja Djaja, PT Biretex Industri, PT Primayuda Mandiri Jaya, 7) AH selaku Direktur PT Perusahaan Dagang.

"Adapun ketujuh orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak

usaha atas nama Tersangka ISL dkk," ungkap keterangan Kejagung, dikutip Selasa (3/6/2025).

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksas Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampsus), Abdul Qohar menjelaskan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp 3.588.650.808.028,57 (Rp 3,58 triliun).

Rincinya sebagai Berikut: 1) Bank Jateng sebesar Rp 395.663.215.800,2) Bank BJB, Bank Banten dan Jawa Barat sebesar Rp 543.980.507.170, 3) Bank DKI sebesar Rp 149.785.018,57, 4) Bank Sindikasi yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI dan LPEI jumlah seluruhnya adalah Rp 2,5 triliun.

Selain pemberian kredit terhubung di atas, Sritex juga mendapatkan pemberian kredit dari 20 Bank Swasta. Ada pun kasus pemberian kredit bank tersebut dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan adanya kerugian keuangan negara. Dari laporan keuangan, Sritex telah melaporkan adanya kerugian dengan nilai mencapai US\$1.008.000.000 atau setara dengan Rp 15,65 triliun pada tahun 2021. Padahal sebelumnya di 2020, Sritex masih mencatat keuntungan setara dengan Rp 1,24 triliun.

"Jadi ini ada keganjilan

dalam satu tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan, kemudian tahun berikutnya juga mengalami kerugian yang sangat signifikan," ucapnya di Kejagung pada Rabu malam, (21/5/2025). "Inilah konsentrasi dari teman-teman penyidik," imbuhnya.

Kemudian Sritex dan entitas anak perusahaannya memiliki kredit dengan nilai total understanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp 3.588.000.000 dan Rp 650.808.028,57. Utang tersebut kepada beberapa bank pemerintah, baik bank Himbara yaitu himpunan bank milik negara maupun bank milik pemerintah daerah. Bukan hanya itu, Sritex juga mendapatkan pemberian kredit dari 20 bank swasta.

Kemudian dalam pemberian kredit kepada Sritex, ZM selaku Direktur Utama PT Bank DKI dan DS selaku pimpinan divisi korporasi dan komisaris komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBB) telah memberikan kredit secara melawan hukum karena tidak melakukan analisa yang memadai dan mentaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah tidak punya syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian dari lembaga.

Abdul Qohar menjelaskan lembaga pemeringkat Moody's melaporkan Sritex hanya memperoleh predikat BB- atau memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A.

Sambungan hal 1

tinggi. Seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A.

Yang seharusnya dilakukan sebelum diberikan finalis kredit sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan standar operasional prosedur Bank serta Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian.

"Bawa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten dan PT Bank DKI Jakarta terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagai tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya," tegas dia.

"Bawa kredit yang diberikan oleh PT Bank pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk saat ini macet dengan kolima dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilai lebih kecil dari nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan sebagai jaminan atau agunan," tuturnya.

Kepala Riset BRIN Tekankan Kualitas dan Dampak Inovasi Daerah Soppeng dalam Ajang Latemmamala 2025



Sekda Kabupaten Soppeng

Andi Ibrahim Hatta, SH, M.Si.

SOPPENG, BN – Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar acara Presentasi dan Wawancara Inovatif Latemmamala Tahun 2025 pada Selasa (27/5/2025), dengan kehadiran virtual Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Ph.D.

Dalam sambutannya, Mardyanto menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan dampak inovasi daerah agar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Beliau juga menyoroti perlunya kolaborasi yang kuat antar OPD dan dukungan penuh dari pimpinan daerah dalam mengembangkan inovasi. Partisipasi inovator dari masyarakat desa juga dianggap krusial untuk menciptakan inovasi yang lebih inklusif dan merata. Mardyanto berharap para nominator dapat terus berinovasi dan menginspirasi lainnya, sehingga Soppeng berpotensi masuk dalam 10 besar inovasi daerah di Indonesia. (anwar p)

Anggaran Disporapar ...

Sambungan hal 1

tetapi juga banyak dilakukan seperti dengan adanya proyek / kegiatan fiktif, penggelapan dan mark-up, maupun penggelembungan harga. Berbagai modus tersebut kerap di temukan dalam pengadaan barang / jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah.

Modus korupsi lainnya yang tak kalah populer adalah laporan fiktif, pemotongan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Seperti halnya di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jombang, terkait anggaran publikasi patut di soroti, karena diduga ada ketidakberesan, selain itu pada anggaran kegiatan yang lain.

Pada edisi sebelumnya sudah pernah dipublikasikan oleh Bidik Nasional (BN) terkait anggaran publikasi. Semetara itu dari data yang ditemukan ada beberapa anggaran kegiatan lain (selain untuk publikasi) di tahun 2025 ini masih ada anggaran kegiatan lain yang patut disoroti, apakah sudah benar penggunaan anggaran tersebut untuk pembelanjaan (LPJ).

1. Belanja pemeliharaan mesin potong rumput dorong senilai Rp 913.000,-
2. Belanja bahan untuk kegiatan kantor lainnya UP. Rp 20.995.225,-
3. Belanja alat pembersih UP. Rp 4.215.500,-
4. Belanja foto copy (Monev destinasi) Rp 56.250,-
5. Belanja sewa elektronik/ elektrik (Olahraga tradisional) Rp 2.500.000,-
6. Belanja bahan bakar pelumas Rp 1.698.00,-
7. Belanja pemeliharaan alat pendingin AC Rp 12.200.000,-
8. Belanja pemeliharaan komputer Rp 16.790.000,-
9. Belanja pemeliharaan printer Rp 13.800.000,-

Dari semua pembelanjaan yang menggunakan uang negara ini apa sudah sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJ). Saat itu juga Kepala Disporapar Jombang Bambang Nurwijanto ketika di konfirmasi melalui ponselnya maupun WhatsApp (WA) nya tidak diangkat, bahkan tidak mau membalasnya.

Jikalau di teliski dan di cermati mulai dari anggaran kegiatan tahun 2025 termasuk untuk kegiatan terkait publikasi di Disporapar Kabupaten Jombang perlu di ungkap karena diduga adanya sejumlah modus dengan kecurangan pada pengelolaan anggaran.

Dugaan adanya modus tersebut bisa di selidiki oleh APH (Aparat Penegak Hukum).

Sementara menurut salah satu tokoh masyarakat Jombang yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan. "Diduga pada anggaran kegiatan di Disporapar Kabupaten Jombang, ada modus adanya kecurangan, selain itu ada manipulasi di dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk ada indikasi penggelembungan anggaran. Jadi seharusnya patut diusut," ujarnya. (Tok)

Proyek Rabat ...

Sambungan hal 2

diduga bahwa hasil yang tidak maksimal tersebut akibat lemahnya dari pengawasan dalam proyek tersebut.

Tampak dalam Papan Nama Proyek, bahwa pihak Pelaksana adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa tentunya persiapan pra pelaksanaan harus maksimal karena ini menyentuh hajat orang banyak.

Jalan adalah sarana bagi masyarakat dalam beraktivitas, namun jika dibangun kemudian hasilnya tidak maksimal tentunya berakibat buruk, dana anggaran Negara terbuang sia-sia. Salah satu masyarakat yang enggan namanya di sebut saat di konfirmasi awak media menuturkan pembangunan jalan rabat beton ini baru beberapa bulan dikerjakan dan sudah mengelupas beberapa titik.

Kami dibuat geram. Pasalnya jalan yang baru dikerjakan mengelupas dan retak kondisi ini membuat warga resah karena harus merasakan dampak yang ditimbulkan. gerutunya.

Dengan adanya pemberitaan ini baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Inspktorat dan pihak (APH) Aparat penegak hukum Jombang untuk turun langsung kelapangan mengkroscek bangunan jalan rabat beton di Dusun tersebut. (Tok)

Gubernur Jawa Barat ...

Sambungan hal 12

begitu mencintai tanah Bogor sebagai tanah pusaka. Bogor adalah pusat peradaban Sunda yang sebenarnya, kolonial Belanda menjadikan Bogor sebagai pusat peradaban negara.

"Selamat Hari Jadi Bogor, kita maju terus membangun Kabupaten Bogor yang istimewa, kita kembalikan Bogor kepada jati dirinya sebagai tanah pusaka," ungkap KDM.

KDM juga menuturkan, tanah ini tanah pusaka, kita kembalikan seluruh arsitekturnya kepada arsitektur kita, buat cerminan kerajaan Sunda, agar orang Bogor merasa inilah Bogor sebagai tanah pusaka, tanah yang aku cintai.

"Kalau ingin jadi pemimpin hebat cintai Bogor dengan sepenuh hati, di awal jabatan saya sebagai Gubernur, saya langsung bongkar bangunan yang merusak peradaban Bogor," tandas KDM. KDM menambahkan, seorang pemimpin ditakdirkan berdiri di atas badi tidak penting elektabilitas tapi lebih penting berani menerjang badai, dan meletakan kerangka besar bagi sendi-sendi pembangunan, "Yuk kita bongkar bangunan yang menyalahi aturan jangan pernah takut, Presiden Prabowo sudah perintahkan tindak semua yang melanggar aturan," pungkas KDM.

Hadir pada upacara tersebut, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor, Anggota DPR RI, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, para mantan Pj. Bupati Bogor, Bupati Bogor periode 2015-2018, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, Komandan Lanud ATS, jajaran wakil dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda. (eml)

Direktur PDAM ...

Sambungan hal 8

bocor. Namun tim sudah turun lapangan untuk memantau memperbaiki pipa yang bocor," kata Bachtiar.

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, banyak keluhan yang disampaikan oleh warga kepada dirinya terkait persoalan distribusi air PDAM yang tidak mengalir selama berhari-hari serta bekas galian pipa bocor yang merusak jalan raya.

Wabup menekankan, agar PDAM Bone memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat Bone. Sesuai arahan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman bahwa kita semua harus berbenah dan bekerja yang lebih baik.

"Saya berharap Direktur PDAM Wae Manurung dapat memberikan perubahan dan inovasi demi pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan PDAM," harap A.Akmal.

Menurut A.Akmal, Pemda tentunya menaruh perhatian serius terhadap layanan air bersih yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Pemda Bone berharap, agar layanan air bersih dapat ditingkatkan dan PDAM mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat serta daerah Bone.

PDAM harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan PDAM, "harap A.Akmal. (edys)

Kasus Dugaan ...

(21/9/2024) lalu. Korban meninggal pasca menjalani operasi amandel di rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo.

Anju Vijayanti ibu korban saat berikan keterangan di LBH Nurani di Jl Gayungsari Barat menceritakan bahwa, pasca membuat laporan Polisi di Polresta Sidoarjo pada 2 Oktober 2024, baru dimintai keterangan untuk di BAP pada 30 September 2024.

"Saya tgl 30 September di BAP oleh penyidik dan melanjutkan rencana otopsi. namun waktu itu menunggu rekommendasi dari majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI)," terang Anju dalam Konferensi Persnya, Senin (26/5/2025).

Namun setelah mendapat rekomendasi dari MKDKI, pihak keluarga tidak diberikan hasil rekom tersebut oleh penyidik Satreskrim Polres Sidoarjo, sehingga rencana atas otopsi tersebut gagal dilakukan. "Sudah 9 bulan perkara yang menimpakannya, dan sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan," tambahnya.

Anju menceritakan kronologis sebelum dilakukan tidak ada operasi, dirinya saat menanyakan berkas apa saja yang perlu ditanda tangani, pihak perawat menyebut tidak ada yang perlu ditanda tangani. "Anak saat waktu itu rencana akan dioperasi pukul 12.00 WIB, pada pukul 09.00 WIB, saya datang dan menanyakan kepada perawat berkas apa saja yang perlu ditanda tangani, perawat mengatakan tidak ada yang perlu di tanda tangani," ujarnya.

Namun setelah mendapat kabar anaknya sudah meninggal, dirinya sempat menanyakan income consent tanda tangani korban atas persetujuan tindakan operasi, pihak rumah sakit hingga saat ini tidak mau menunjukkan.

Anju juga menyebutkan, tindakan operasi yang dilakukan

sudah dimintai keterangannya seminggu yang lalu," punkasnya.

Perlu diketahui, pihak keluarga sudah melaporkan RSI Siti Hajar ke Polresta Sidoarjo. Laporan itu telah diterima SPKT dan terregister dengan nomor LP-B/532/X/2024/SPKT/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JATIM tertanggal 2 Oktober 2024, lalu.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Fahmi Amarrullah, dikonfirmasi rekan media mengatakan, bahwa pihaknya saat ini masih terus mendalamkan laporan tersebut. "Iya masih kita lidik. Setiap ini (pertumbuhan) dilaporkan ke pelapor. (Pihak RSI Siti Hajar) sudah (dipanggil)," ujar Fahmi.

Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Binaan Indonesia (UBHARA) Surabaya, Prof. M. Sholehuddin, menilai bahwa dalam konteks pertanggungjawaban pidana, menurut kaca matanya, dokter bedah dan dokter anestesi adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

Menurutnya, kedua dokter itu yang terlibat langsung dalam tindakan medis terhadap pasien yang menjadi korban dalam kasus tersebut. "Menurut pandangan saya di perkara ini, dokter bedah dan dokter anestesi paling bertanggung jawab dalam konteks pidana karena melakukannya langsun. Berarti dokternya," ujar Prof. Sholehuddin.

Ia menegaskan, pelaporan terhadap rumah sakit secara kelembagaan tidak bisa langsung dikategorikan dalam ranah hukum pidana. "Kalau yang dilaporkan rumah sakit, itu masuk wilayah hukum perdata karena ujungnya berkaitan dengan ganti rugi," jelasnya.

Tak hanya soal pertanggungjawaban pidana, Prof. Sholehuddin juga mempertanyakan aspek kelalaian dalam prosedur medis yang dijalankan sebelum ilahi. (Teddy)

Pemkot Bandung Buktikan Mampu Raih WTP Berulang Kali!

BANDUNG, BN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan kali kelima Kota Bandung setelah dua tahun kebelakang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

LAPORAN Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024 secara resmi diterima oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dan Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Senin, 26 Mei 2025 lalu.

Farhan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandung yang telah bekerja keras dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Alhamdulillah, Opini WTP ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah di Pemkot Bandung. Didukung oleh pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa 27 Mei 2025.

Ia mengatakan, Opini WTP ini menjadi motivasi bagi Pemkot Bandung untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. "Kami sangat bersyukur bahwa dalam tiga bulan, betul-betul kerja keras memastikan laporan kita sampaikan ini memenuhi berbagai macam persyaratan dan ketentuan sehingga mendapat WTP," tuturnya.

Atas hal tersebut, menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot Bandung dalam meningkatkan inovasi dalam reformasi birokrasi. "Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam reformasi birokrasi, memperbaiki sistem, memperkuat integritas dan tentu saja menghadirkan layanan publik yang prima dengan anggaran yang efisien dan tepat sasaran," tuturnya.

Menurutnya, ini sebagai bukti bahwa seluruh jajaran

Pemkot Bandung berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. "Pencapaian WTP ini juga kami persembahkan bagi seluruh masyarakat Kota Bandung. Ini adalah bukti bahwa setiap rupiah dari pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara transparan," tuturnya.

"Kepercayaan ini akan terus kami jaga dengan memberikan pelayanan terbaik dan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh warga Bandung," imbuh Farhan.

Perlu diketahui, Pemkot Bandung telah melakukan beberapa upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK atas empat permasalahan yang menjadi pengecualian pada periode sebelumnya yaitu :

1. Aset Tetap sebesar Rp 551 miliar belum dapat dipastikan status dan keberadaannya.

2. Sebanyak 1.141 bidang tanah yang disewakan luasnya lebih besar dari luas tanah yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah (BMD) dengan selisih sebesar 139.465 meter persegi yang belum dapat dijelaskan selisihnya.

3. Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada 14 perumahan sebesar Rp187,99 miliar dalam Neraca Pemerintah Kota Bandung sudah beralih fungsi dan tidak dikuasai oleh Pemkot Bandung.

4. Pemkot Bandung belum menyajikan Aset PSU pada 95 perumahan yang telah diserahterimakan sebesar Rp4 triliun.

Pemkot Bandung telah menindaklanjuti permasalahan yang menjadi pengecualian pada periode sebelumnya dengan:

1. Melakukan inventarisasi Aset Tetap secara Sensus untuk penelusuran atas Aset Tetap sebesar Rp551,72



Walikota Bandung, M. Farhan beserta Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Senin, 26 Mei 2025. (Photo: Istimewa)

miliar sehingga sebesar Rp498,98 miliar diantaranya telah dapat diketahui status dan keberadaannya. Sisanya sebesar Rp 52,74 miliar berupa aset rusak berat, aset hilang dan aset yang telah dihancurkan sedang dalam proses verifikasi Inspektorat Kota Bandung.

2. Memverifikasi 1.141 bidang tanah sehingga menemukan 764 objek tanah sewa seluas 289 ribu meter persegi yang belum tercatat pada Daftar BMD sebesar Rp222.407.318.814 dan telah menyajikannya pada Neraca per 31 Desember 2024

3. Melakukan pengama-

nan PSU atas delapan perumahan, sedangkan atas enam perumahan lainnya merupakan Aset PSU yang terdampak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan pihak yang ditunjuk KCIC menyatakan bahwa atas Aset PSU tersebut akan direlokasi/diganti ke lokasi lainnya sesuai Berita Acara Kesepakatan Fasilitas Sosial (Fasos) Fasilitas Umum (Fasum) Terdampak Proyek KCIC

4. Menyajikan Aset PSU yang telah diserahterimakan oleh pengembang pada 95 perumahan sebesar Rp. 7 trilyun pada Neraca per 31

Desember 2024.

DPRD Apresiasi Pemkot Raih WTP

Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Senin, 26 Mei 2025.

Asep Mulyadi pada kesempatan itu, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Bandung atas raihan opini WTP itu.

Prestasi itu cukup mele-

gakan setelah dua tahun terakhir Pemkot Bandung menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Alhamdulillah hasil laporan ini adalah WTP. Ini tentunya jadi modal dasar untuk perbaikan terus ke depan. Walaupun tadi ada beberapa catatan juga terkait beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dalam 60 hari ke depan," tutur pria yang biasa disapa Kang Asmul itu.

Menurutnya, capaian ini menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi dan pembenahan sistem penganggaran yang dilakukan sejak awal pemerintahan Wali Kota Farhan telah berjalan di jalur yang benar.

"Kami di DPRD Kota Bandung pun berkomitmen untuk terus menjaga fungsi pengawasan dengan cara yang konstruktif. Politik tidak cukup dengan kritis, harus ada kontribusi dalam solusi. Ini yang selalu kami bawa dalam setiap rapat anggaran dan pengawasan," tambahnya.

Sebagai partai pengungsi utama Wali Kota Bandung, Partai NasDem Kota Bandung juga melihat keberhasilan ini sebagai pijakan moral dan politik untuk terus mendorong pemerintahan yang lebih bersih dan responsif.

"Capaian ini bukan akhir, tapi awal untuk kerja-kerja yang lebih besar. WTP harus menjadi standar, bukan sekadar prestasi insidental," tegas Awangga.

"Opini WTP dari BPK adalah pengakuan bahwa

(Adv)

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Serahkan LHP LKPD Tahun Anggaran 2024

BANDUNG, BN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat. Dari 27 pemerintah kota dan kabupaten, yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 19 wilayah.

Kemudian opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH) sebanyak tiga wilayah, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. WTP dengan Penekanan Suatu Hal dan Hal Lain (WTP PSHHL) satu wilayah Kota Bekasi, WTP dengan Paragraf Hal Lain (WTP PHL) dua wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bandung. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) satu wilayah Kabupaten Pangandaran, dan WDP PSH satu daerah Kabupaten Kuningan.

Sementara 19 daerah WTP yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Garut.

Kepala BPK Perwakilan Jabar, Eydu Oktain Panjaitan menuturkan, pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberi opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. "Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan," ucapnya, Selasa 27 Mei 2025.

Tujuan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK meliputi penilaian kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

BPK sendiri melakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap laporan keuangan Pemkot Bandung sejak akhir Maret hingga April 2024. Sedangkan, penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam waktu 2 bulan setelah laporan keuangan yang belum diaudit diterima oleh BPK.

Bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memang selama dua tahun menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan keuangan, namun demikian Pemkot Bandung akhirnya mencatatkan prestasi membanggakan, meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Capaian ini bukan sekadar gelar administratif, tetapi simbol pulihnya kepercayaan terhadap tata kelola anggaran yang selama ini terus diperbaiki dengan penuh kerja keras dan komitmen.

Prestasi ini terasa semakin istimewa karena Kota Bandung sebelumnya sempat dua tahun berturut-turut hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), indikasi adanya sejumlah kelemahan dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan daerah. Kini, dengan opini tertinggi yang kembali diraih, Bandung seolah keluar dari masa pemulihan kredibilitas dan memasuki babak baru tata kelola keuangan yang lebih sehat dan akuntabel.

Penyerahan secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2024 oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi ini bukan sekedar formalitas, tetapi simbol konkret Bandung kembali dipercaya sebagai kota dengan tata kelola anggaran yang bersih dan terukur.

(Adv)

UPT Pelabuhan Perikanan Puger Bersama Mahasiswa Unej dan Muspika Bersih-bersih Lingkungan Pelabuhan



Kegiatan UPT Pelabuhan Perikanan Puger bekerjasama dengan mahasiswa Universitas Jember (UNEJ) dan Muspika Puger saat bersih-bersih kawasan pelabuhan perikanan Puger. (dkp)

JEMBER, BN - Kawasan Puger merupakan kawasan padat pemukiman dan penduduk. Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terletak diapit oleh dua desa yakni Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, pada tahun 2024 dua desa tersebut memiliki jumlah penduduk sebesar 28.285 jiwa. Sehingga isu tentang kebersihan dan kesehatan masyarakat cukup menjadi perhatian, terlebih oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Jember (UNEJ).

Pada Sabtu tanggal 17 Mei 2025 UPT Pelabuhan Perikanan Puger bekerjasama dengan mahasiswa Universitas Jember (UNEJ) mengadakan kegiatan bersih-bersih kawasan pelabuhan perikanan. Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan magang praktikum

lapang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UNEJ dengan tema "Peningkatan Kapasitas Mahasiswa Dalam Advokasi Kesehatan Melalui Komunikasi Efektif, Desain Strategis, dan Simulasi Peran Pada Komunitas Pertanian dan Perkebunan" di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.

Selain diikuti oleh staf Pelabuhan Perikanan Puger dan mahasiswa FKM UNEJ kegiatan ini juga melibatkan Muspika Kecamatan Puger, Polda Puger, Koramil Puger, Satpolairud Jember, Pos TNI AL Puger serta masyarakat dan pedagang di kawasan Pelabuhan Perikanan Puger.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi advokasi kepada masyarakat dan memberi edukasi agar mereka senantiasa meningkatkan kesadaran akan pentingnya selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah maupun di wilayah tempat mereka bekerja. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat diharap bisa turut andil dalam menjaga kawasan mereka, sehingga dengan kawasan yang bersih nantinya akan tercipta kehidupan masyarakat yang sehat. (dkp/adv)



Gubernur Jawa Barat Pimpin Upacara Peringatan HJB Ke-543, KDM: Mari Kembalikan Bogor Sebagai Tanah Pusaka



Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM). (eml)

BOGOR, BN-Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) memimpin upacara peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543, di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, KDM berpesan, pada momentum HJB ke-543 ini mari kembalikan Bogor kepada jati dirinya sebagai tanah pusaka yang dicintai. Selasa (3/6/2025).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan, kemuliaan baginya bisa hadir di Bogor sebagai orang yang

■ Bersambung ke hal.11 kol.5